



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

BPFK
JAKARTA



Rencana Bisnis Anggaran BPFK JAKARTA Tahun 2023



WWW.BPFKJAKARTA.OR.ID



LEMBAR PENGESAHAN 1

BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)

TAHUN ANGGARAN 2023

BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA

KEPALA BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA



Subadri, ST.M.Si.

NIP. 197611122005011003



LEMBAR PENGESAHAN

BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA

**RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)
TAHUN ANGGARAN 2023
BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA**

**PEJABAT PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM/
DIREKTUR FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN**



**dr. Aswan Usman, M.Kes
NIP. 197104042002121001**


KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan HidayahNya sehingga Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta dapat menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 serta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BPFK Jakarta Tahun 2023 mengacu pada Rencana Strategis Bisnis 2020-2024 yang disusun berdasarkan basis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima serta APBN. RBA merupakan peta rencana kerja dalam pembiayaan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan untuk membantu fungsi pengelolaan keuangan dan non keuangan secara efisiensi dan dapat dipergunakan sebagai alat kontrol untuk menilai indikator kinerja keuangan, indikator kinerja pelayanan, indikator kinerja mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat dengan harapan kinerja dalam tahun 2023 akan lebih meningkat dari tahun sebelumnya.

Kami berharap RBA ini menjadi acuan dan pedoman kerja tahunan yang dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mewujudkan visi misi Menjadi Pusat Layanan Pengamanan Fasilitas Kesehatan di Indonesia tahun 2023.

Jakarta, 31 Desember 2022
Kepala Balai Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Jakarta,



Subadri, ST.M.Si.
NIP 197611122005011003

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN 1	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
LEMBAR PENGESAHAN 2	1
KATA PENGANTAR	3
RINGKASAN EKSEKUTIF	6
BAB I PENDAHULUAN	9
1. GAMBARAN UMUM	9
2. VISI DAN MISI BLU	15
3. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA BLU DAN DEWAN PENGAWAS	20
BAB II KINERJA TAHUN BERJALAN (TA 2021) DAN RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) TAHUN 2023	25
1. Gambaran Kondisi BLU Tahun 2023	25
2. Keuangan	27
3. Rencana Kinerja Layanan BLU	34
4. Rencana Kinerja Keuangan	41
BAB III PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Hal-Hal Lain Yang Perlu Mendapat Perhatian	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jenis Layanan BPFK Jakarta.....	12
Tabel 2 Perbandingan Tenaga teknis dan Administrasi BPFK Jakarta	17
Tabel 3 Rencana Pengembangan jumlah SDM BPFK.....	18
Tabel 4 Penambahan Ruang Lingkup Akreditasi 2022-2023	26
Tabel 5 Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	30
Tabel 6 Asumsi Mikro Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran.....	31
Tabel 7 Asumsi Mikro Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran.....	32
Tabel 8 Pencapaian Target Kinerja Tahun Anggaran 2022	34
Tabel 9 Tabel. Penambahan Jenis layanan BPFK Jakarta tahun 2022 - 2023	367
Tabel 10 Layanan Inovasi BPFK Jakarta diluar tupoksi	38
Tabel 11 Penambahan jenis layanan Inovasi BPFK Jakarta 2022-2023.....	38
Tabel 12 Rincian Pendapatan per Unit Kerja.....	42
Tabel 13 Rincian Pendapatan dan Belanja per unit Kerja.....	45
Tabel 14 Pendapatan Belanja Agregat.....	46
Tabel 15 Estimasi Saldo Akhir TA (n-1) dan Saldo Awal TA (n).....	47
Tabel 16 Perhitungan Beban Layanan Per Unit Kerja.....	48
Tabel 17 Prakiraan Maju Pendapatan dan belanja.....	52
Tabel 18 Rencana Kebutuhan RM.....	52
Tabel 19 Ambang Batas Belanja.....	533

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI di bidang pelayanan pengujian kalibrasi yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Sebagai satker BLU diwajibkan menyusun Rencana Bisnis Anggaran yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi serta Rencana Strategis Bisnis BPFK Jakarta Tahun 2020 s.d 2024. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta yaitu melaksanakan pengamanan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi dilingkungan pemerintah maupun swasta. Maka Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta menerapkan visi "Menjadi Pusat Layanan Pengamanan Fasilitas Kesehatan di Indonesia tahun 2023.

Sedangkan misi antara lain : a. Memberikan pelayanan pengamanan fasilitas kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan inspeksi yang akurat, terpercaya, komprehensif dengan teknologi terkini ; b. Memberikan bimbingan teknis dan peningkatan kompetensi personel di bidang pelayanan pengamanan fasilitas kesehatan; c. Mewujudkan tata kelola balai yang transparan dan akuntabel. Kinerja BPFK Jakarta tahun 2023 dipengaruhi oleh faktor/kondisi internal dan eksternal, salah satunya adalah berubahnya status pengelolaan keuangan dari satuan kerja PNPB menjadi satuan kerja PPK-BLU. Perubahan status tersebut menyebabkan peningkatan jumlah kemampuan jenis layanan yang sangat mempengaruhi capaian target pendapatan BPFK Jakarta yang bersumber dari jasa layanan.

Gambaran realisasi pendapatan dan realisasi belanja BPFK Jakarta Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Jumlah penerimaan pendapatan berdasarkan realisasi tahun anggaran 2021 sampai akhir Desember 2021 sebesar Rp10.153.764.120,- dari target sebesar Rp8.500.000.000,- atau sebesar 119.46%.
2. Alokasi Belanja Pegawai Tahun anggaran 2021 sebesar Rp10.719.344.000,- dengan realisasi sebesar Rp10.594.415.600,- atau sebesar 98.83%.
3. Alokasi Belanja Barang Tahun anggaran 2021 sebesar Rp17.072.201.000,- dengan realisasi sebesar Rp14.990.390.632,- atau sebesar 87,81%.
4. Alokasi Belanja Modal Tahun anggaran 2021 sebesar Rp10.412.782.000,- dengan realisasi sebesar Rp9.941.285.446,- atau sebesar 95,47%.

Asumsi penting yang digunakan serta faktor-faktor baik internal maupun eksternal yang akan mempengaruhi pencapaian target kinerja tahun 2023 adalah :

1. Asumsi Makro

NO.	PARAMETER	ASUMSI 2023
1	Tingkat Inflasi	3,5 %
2	Tingkat Bunga Deposito	5,5 %
3	Nilai tukar rupiah / Kurs \$ 1	Rp15.198
4	Tingkat Bunga Pinjaman (SIBOR/LIBOR)	6,5 %

Sumber : www.bi.go.id Tahun 2022

2. Asumsi Mikro

NO.	PARAMETER	ASUMSI 2023
1	Anggaran Remunerasi Pegawai	Sebesar 27 % dari total anggaran
2	Anggaran Biaya Operasional	Sebesar 26,8 % dari total anggaran
3	Anggaran Biaya Investasi	Sebesar 40 % dari total anggaran
4	Tarif Pelayanan yang digunakan untuk setiap jenis pelayanan	Berdasarkan Unit Cost 100 %
5	Volume pelayanan	Meningkat sebesar 10%
6	Kebutuhan Pengembangan SDM	Terpenuhi sebesar 100 %
7	Peralatan Kesehatan	Berfungsi sebesar 60 %

3. Target Pendapatan Tahun Anggaran 2023

Dengan melihat perkembangan situasi terkini dan asumsi-asumsi yang dianggap dapat menentukan dan mempengaruhi kebutuhan anggaran serta pencapaian target pendapatan, maka ditetapkan Kebutuhan biaya BPFK Jakarta TA 2023 sebesar Rp 28.825.184.000,- terdiri dari PNB/BLU sebesar Rp8.154.735.000,- dan berasal dari Rupiah Murni sebesar Rp20.670.429.000,- . Ambang batas yang diusulkan 10%,-

Secara umum sasaran Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta memberikan pelayanan pengamanan fasilitas kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan inspeksi yang akurat, terpercaya, komprehensif dengan teknologi terkini. Sasaran umum akan dicapai dengan strategi bisnis sebagai berikut : 1. Peningkatan kepuasan pelanggan, 2. Peningkatan cakupan jenis pelayanan SPA yang terakreditasi, 3. Peningkatan cakupan jenis pelayanan SPA, 4. Peningkatan ketercapaian standar pelayanan minimum, 5. Pengembangan sarana dan prasarana BPFK Jakarta, 6. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sesuai visi dan misi BPFK Jakarta, 7. Peningkatan pendapatan melalui produktifitas pelayanan, 8. Mempunyai tata kelola keuangan melalui badan layanan umum.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja pelayanan terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal . Untuk meningkatkan pelayanan BPFK Jakarta sedang dalam proses pengembangan di beberapa sektor, yaitu: Penguatan Layanan BPFK Jakarta, Modernisasi IT dan Digitalisasi Proses Bisnis; Optimalisasi Aset Idle; Manajemen Pemeliharaan Alat Kesehatan, Kerjasama Operasional dan Efisiensi Anggaran (kekuatan : adanya factor beberapa regulasi yang mewajibkan fasyankes melakukan pengujian dan kalibrasi alkes.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum

Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI yang mempunyai tugas melaksanakan pengamanan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi dilingkungan pemerintah maupun swasta. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan menjalankan fungsi adalah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- 2) Pengujian dan kalibrasi alat kesehatan;
- 3) Pengujian dan kalibrasi sarana dan prasarana kesehatan;
- 4) Pengamanan dan pengukuran paparan radiasi;
- 5) Pelayanan monitoring dosis radiasi personal;
- 6) Pengukuran luaran radiasi terapi;
- 7) Pengendalian mutu dan pengembangan teknologi
- 8) Pengamanan fasilitas kesehatan;
- 9) Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pengujian,
- 10) Kalibrasi, proteksi radiasi, sarana dan prasarana kesehatan;
- 11) Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan;
- 12) Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengamanan fasilitas kesehatan;
- 13) Pengelolaan data dan sistem informasi;
- 14) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- 15) Pelaksanaan urusan administrasi BPFK.

Seluruh kegiatan tersebut di atas sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 61 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.05/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum maka organisasi dan tata kerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta mulai berpedoman

pada peraturan tersebut dengan subsidi dari pemerintah yang masih diterima untuk membiayai kegiatan investasi dan kegiatan operasional. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di lingkungan yang berubah sangat cepat, maka Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta yang mempunyai tugas melaksanakan pengamanan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi di lingkungan pemerintah dan swasta, sehingga peralatan dan sarana prasarana fasilitas kesehatan memenuhi kualitas dan standar keselamatan dan keamanan kepada tenaga kesehatan maupun kepada pasien. Untuk menjaga kesinambungan mutu alat kesehatan yang sesuai dengan standar dan harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan dan siap bersaing serta menerapkan prinsip-prinsip manajemen bisnis untuk memenuhi tuntutan pelayanan prima dari masyarakat. Peningkatan mutu pelayanan baik dari segi kecepatan layanan, kualitas sumber daya manusia, mengembangkan pelayanan unggulan serta peralatan laboratorium yang canggih merupakan tantangan yang mendorong institusi ini untuk mempertahankan komitmennya dalam melakukan usaha perbaikan yang berkesinambungan.

a. Landasan Hukum dan Sejarah Perkembangan BPFK Jakarta

Landasan hukum Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta yaitu :

- A. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- D. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- E. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- F. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan;
- G. Peraturan Menteri Keuangan No.5/KMK.05/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum maka organisasi dan tata kerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta;
- H. PMK Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
- I. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-2/PB/2022 tentang Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum

Pada tahun 1975 dibawah naungan Direktorat Instalasi Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Departemen Kesehatan RI atas bantuan World Health Organisation (WHO) Pelayanan Monitoring Dosis Radiasi Perorangan mulai dilakukan yang pada saat itu

bernama Film Badge Service. Pada tahun 1983/1984, nama Film Bdage Service sudah berubah menjadi Balai Pemeliharaan Peralatan Proteksi Radiasi dan Kalibrasi (BP3K) yang sudah menjadi embrio dari Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan. Tahun 1989/1990 BPF3K menempati gedung di Jl. Percetakan Negara 23 A Jakarta Pusat, dengan jumlah pegawai dan peralatan yang semakin berkembang. Tahun 1993 BP3K dan berubah nama menjadi Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) dengan anggaran yang dikelola sendiri. Pada tanggal 3 Agustus 2000 Terbit Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1164/MENKES/SK/VIII/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan fasilitas Kesehatan Jakarta, pelayanan kalibrasi alat kesehatan mulai dilaksanakan. Pada tanggal 27 April 2007 Terbit Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 530/MENKES/PER/IV/2007 tentang Organisasi dan tata Kerja Balai Pengamanan fasilitas Kesehatan. Tahun 2009 Laboratorium Kalibrasi terakreditasi oleh Komite Akreditasi nasional (KAN), dan tahun 2010 Laboratorium Pengujian Pemantauan Dosis Radiasi Perorangan juga terakreditasi Komite Akreditasi nasional (KAN). Pada tanggal 26 Oktober tahun 2020 terbit lagi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan yang melaksanakan tugas dibidang pengamana fasilitas kesehatan yang bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal.

Awal tahun 2023 Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta berubah status menjadi Satker PPK BLU sesuai Keputusan Menteri Keuangan No.5/KMK.05/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Penetapan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta pada Kemeterian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tahun 2023 BPFK Jakarta mengajukan perubahan usulan tarif pelayanan di BPFK Jakarta pada Kementerian Keuangan agar fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

b. Karakteristik Bisnis BPFK Jakarta

Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI yang mempunyai tugas melaksanakan pengamanan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi dilingkungan pemerintah maupun swasta, dan memiliki tugas melakukan pengamanan fasilitas kesehatan di Indonesia melalui kegiatan, dan adapun jenis layanan yang dimiliki dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1 Jenis Layanan BPFK Jakarta

NO	LAYANAN	KETERANGAN	2021	2022	Proyeksi 2023
1	Pengujian dan Kalibrasi Alkes	(jml alat kesehatan)	27571	23884	39690
2	Kalibrasi Alat Ukur Standar dan Alat Ukur Radiasi	(jml alat ukur standar)	512	720	864
3	Inspeksi Sarana dan Prasarana	(jml Instalasi)	68	165	595
4	Uji kesesuaian pesawat X	(jml alat kesehatan)	727	330	360
5	Pemantauan Dosis perseorangan	(jml unit)	18393	4200	4466
6	Uji Produk	(jml alat kesehatan)	60	48	144
7	Bimbingan teknis	(jml orang)	49	30	35
8	Uji Profisiensi	(jml alat kesehatan dan alat ukur)	41	120	160

Adapun penjelasan untuk setiap layanan di BPFK Jakarta adalah sebagai berikut:

1) Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan

Sesuai Permenkes Nomor 54 tahun 2015 definisi pengujian adalah keseluruhan tindakan yang meliputi pemeriksaan fisik, dan pengukuran untuk membandingkan alat yang diukur dengan standar, atau untuk menentukan besaran atau kesalahan pengukuran. Jenis alat Kesehatan menurut salah satu badan riset kesehetandunia *Emergency Care Research Institute (ECRI)* ada 600 jenis alat Kesehatan. BPFK Jakarta sampai dengan tahun 2022 sudah mampu melayani 143 jenis layanan dan 28 jenis layanan sudah terakreditasi. Hasil dari pengujian dan kalibrasi adalah pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa alat kesehatan tersebut laik pakai atau tidak laik pakai. Pengertian laik pakai adalah alat kesehatan tersebut aman untuk digunakan, sedangkan tidak laik pakai artinya alat tersebut tidak aman dan memerlukan tindakan *adjustment* atau perbaikan.

2) Kalibrasi Alat Ukur Standar dan Alat Ukur Radiasi

Instalasi Laboratorium Kalibrasi Alat Ukur Standard dan Alat Ukur Radiasi – Balai Pengamanan fasilitas pelayanan kesehatan sangat berkaitan erat dengan menjaga mutu dan ketertelusuran pengujian dan Kalibrasi alat kesehatan. Dengan semakin bertambahnya kemampuan pelayanan BPFK Jakarta dalam hal pengujian dan kalibrasi alat kesehatan akan semakin bertambah pula kemampuan menjaga mutu dan ketertelusuran alat alat uji dan kalibrasinya. Dengan demikian harapan untuk semakin terjaganya mutu dan ketertelusuran kalibrasi alat kesehatan diseluruh Fasilitas pelayanan kesehatan Indonesia akan semakin baik.

3) Inspeksi Sarana dan Prasarana

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit menjelaskan bahwa Prasarana rumah sakit adalah utilitas yang terdiri atas alat, jaringan dan sistem yang menjadikan suatu bangunan rumah sakit berfungsi. Inspeksi sarana dan prasarana dilakukan untuk memastikan kesesuaian suatu instalasi sarana dan prasarana merujuk standar dan persyaratan yang berlaku.

4) Proteksi Radiasi dan Uji Kesesuaian

Layanan proteksi radiasi dan uji kesesuaian adalah jenis pengujian alat kesehatan yang berkaitan dengan peralatan radiasi pengion dan *imaging*. Pengujian ini dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun berdasarkan PERMENKES 54 Tahun 2015. Pengujian dilakukan untuk memastikan pesawat x-ray dan *imaging* di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standard dan memenuhi persyaratan operasional regulasi.

Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional yang selanjutnya disebut Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X adalah uji untuk memastikan Pesawat Sinar- X dalam kondisi andal, baik untuk kegiatan Radiologi Diagnostik maupun Intervensional dan memenuhi peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan PERKA BAPETEN No. 2 Tahun 2018. Jenis layanan lain adalah pengukuran paparan radiasi. Pengukuran paparan radiasi dan proteksi radiasi adalah kegiatan untuk memastikan bahwa tingkat paparan pada fasilitas radiasi dalam keadaan memenuhi unsur keamanan dan keselamatan bagi pengguna, pasien dan masyarakat sekitar.

5) Pemantauan dosis perorangan

Evaluasi pemantauan dosis radiasi yang dipakai oleh pelaksana yang bekerja di lingkungan radiasi yang tidak terbatas pada sarana pelayanan kesehatan. BPFK Jakarta melayani evaluasi pemantauan dosis perorangan untuk thermoluminescent dosimeter (TLD) badge. Penggunaan TLD Badge untuk mengetahui besarnya Nilai Batas Dosis (NBD) radiasi yang diterima operator pesawat sinar X. Evaluasi pemantauan dilakukan secara rutin minimal 3 (tiga) bulan sekali.

6) Uji Produk Alat Kesehatan

Uji Produk alat kesehatan adalah kegiatan pengujian yang dilakukan terhadap alat kesehatan produk baru dan alat kesehatan inovasi (pengembangan) sebelum diproduksi dan dipasarkan. Hasil uji berkesesuaian dengan dokumen standard nasional ataupun internasional. Dengan semakin berkembangnya produk-produk inovasi alat kesehatan karya anak bangsa, pelayanan di Laboratorium Uji Produk mengalami peningkatan tajam dari tahun-tahun sebelumnya. Laporan hasil uji produk dapat digunakan untuk lampiran persyaratan dikeluarkannya nomor izin edar alat Kesehatan oleh Direktorat Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan. Produsen yang telah mendapatkan izin edar baru dapat memasarkan produknya di Indonesia. Lab Uji Produk yang telah terakreditasi sebagai Laboratorium Pengujian oleh Komite Akredias Nasional (KAN). Tahun 2022 kemampuan layanan uji produk ada 46 jenis alat.

7) Kemitraan dan Bimbingan Teknis

Layanan ini terbagi atas dua sub layanan, yang pertama terkait dengan jejaring kemitraan seperti pembuatan nota kesepahaman (MoU), Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan stakeholder BPFK Jakarta dalam rangka percepatan dan akselerasi layanan pengamanan fasilitas kesehatan. Ruang lingkup kerjasama dapat berupa penelitian, konsultasi, praktek / magang dan bimbingan teknis, atau BPFK Jakarta menerima pengampunan layanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan yang dilakukan rumah sakit rujukan sekaligus rumah sakit pendidikan sesuai dengan Permenkes 54 Tahun 2015 tentang pengujian dan kalibrasi alat kesehatan. Sub layanan kedua adalah Bimbingan Teknis, yakni sesuai dengan misi BPFK Jakarta memberikan pelayanan peningkatan kompetensi personil dibidang pengamanan fasilitas kesehatan, salahsatunya Peneliti, PKL dan Magang.

8) Penyelenggara Uji Profisiensi

Program Uji Profisiensi (uji banding antar laboratorium) adalah suatu program evaluasi kinerja laboratorium kalibrasi/pengujian terhadap kriteria yang telah ditetapkan sesuai kompetensinya.

Manfaat Keikutsertaan dalam Uji Profisiensi :

- a. Membantu laboratorium peserta Uji Profisiensi untuk mendeteksi adanya penyimpangan dalam pengujian (dalam metode, peralatan dan pelaksanaan pengujian), serta menemukan penyebab dan cara perbaikan / koreksinya.
- b. Sebagai sarana jaminan mutu hasil pengujian
- c. Pemenuhan persyaratan KAN:
 - Bagi laboratorium yang sudah terakreditasi
 - Bagi laboratorium yang akan mengajukan akreditasi
- d. Masukan bagi KAN:
 - Untuk memantau kinerja/ kemampuan/ kompetensi teknis laboratorium
 - Bahan pertimbangan dalam pemberian akreditasi.

2. Visi dan Misi BLU

a. Visi dan Misi BLU

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPFK Jakarta telah menetapkan visi sebagai petunjuk arah dalam kegiatan rutinnya. Adapun visi BPFK Jakarta adalah **"Menjadi Pusat Layanan Pengamanan Fasilitas Kesehatan di Indonesia"**. Rencana jangka Panjang BPFK Jakarta yang dituangkan dalam visi ini ditetapkan dengan melihat situasi dan kondisi pelayanan kalibrasi di Indonesia. Untuk mencapai visi tersebut di atas, BPFK Jakarta mempunyai misi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan pengamanan fasilitas kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan inspeksi yang akurat, terpercaya, komprehensif dengan teknologi terkini;
2. Memberikan bimbingan teknis dan peningkatan kompetensi personel di bidang pelayanan pengamanan fasilitas kesehatan;
3. Mewujudkan tata kelola balai yang transparan dan akuntabel.

b. Gambaran Umum Kondisi BLU tahun 2023

Dengan pelaksanaan Badan Layanan Umum (BLU), Proyeksi Keuangan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan pada tahun 2023 diharapkan lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan jasa Pengujian, kalibrasi, inspeksi sarana prasarana alat kesehatan maupun usaha lainnya. Pengelolaan operasional mengacu pada rencana strategis bisnis yang sehat dengan

tetap memperhatikan perimbangan penerimaan dan biaya operasional. Jenis layanan direncanakan, dipersiapkan untuk jenis layanan sesuai tupoksi, dan jenis layanan inovasi diluar tupoksi dengan menerapkan sistem manajemen yang efektif, efisien serta akuntabel. Peningkatan jenis layanan pada tahun 2023 dari kualitas dan kuantitas, direncanakan dengan melihat sumber daya yang dimiliki saat ini. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan jenis layanan:

- Penambahan ruang lingkup layanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan;
- Penambahan ruang lingkup layanan kalibrasi alat ukur standar alat kesehatan;
- Penambahan ruang lingkup layanan inspeksi sarana prasarana fasilitas kesehatan;
- Sebagai provider Uji profisiensi / Uji banding antar laboratorium sejenis;
- Inovasi layanan diluar tupoksi (Pelatihan teknis, Lembaga sertifikasi Produk, Tempat Uji Kompetensi dan lain-lain)

c. Upaya BPFK Jakarta dalam mencapai Visi & Misi

Upaya yang dilakukan untuk dapat menjalankan strategi dan sasaran dalam mencapai visi dan misi BPFK Jakarta adalah dengan membuat program yang lebih rinci, realistis dan relevan dengan tujuan pengembangan layanan BPFK Jakarta pada tahun 2023. Perkembangan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah rumah sakit, klinik, dan puskesmas sesuai dengan 9 (Sembilan) provinsi wilayah binaan BPFK Jakarta, Hal tersebut merupakan tantangan dan peluang yang potensial untuk meningkatkan pendapatan BPFK Jakarta. Untuk mencapai peningkatan mutu layanan BPFK Jakarta sesuai visi dan misi, maka dilakukan program startegis dibawah ini :

1. Mewujudkan kepuasan pelanggan
2. Meningkatkan kualitas dan cakupan jenis pelayanan SPA yang terakreditasi
3. Meningkatkan ketercapaian standar pelayanan minimum
4. Mengembangkan sarana dan prasarana BPFK Jakarta
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM sesuai visi dan misi BPFK Jakarta
6. Meningkatkan pendapatan melalui produktifitas pelayanan
7. Mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel

Target Rencana Strategis Bisnis tertuang dalam dokumen renstra yang disajikan dibawah ini dengan tujuan untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pengembangan BPFK Jakarta dalam membuat perencanaan secara terpadu dan harmonis serta cara pengendaliannya untuk jangka waktu 5 tahun (2022-2026). Diharapkan renstra tersebut

mampu mendukung program Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dalam meningkatkan kualitas, keamanan dan keselamatan di fasilitas pelayanan Kesehatan.

Tujuan dari Rencana Strategi Bisnis Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta adalah:

1. Panduan dalam menentukan arah strategis dan prioritas tindakan selama periode lima tahunan yang sejalan dengan Rencana strategis Kementerian Kesehatan
2. Pedoman strategis dalam pola penguatan dan pengembangan mutu kelembagaan BPFK Jakarta
3. Dasar rujukan untuk menilai keberhasilan pemenuhan misi BPFK Jakarta dan dalam pencapaian visi yang telah ditetapkan
4. Rujukan untuk membangun arah jalinan kerjasama dengan para *stakeholders* inti UPT vertikal.

Program pengembangan lainnya yang disiapkan untuk tahun 2023 diantaranya berupa pengembangan sarana prasarana yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 meliputi pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (**SIMPEL**) yang terintegrasi ke Balai Sertifikasi Elektronik (**BSRE**) dan Aplikasi Sarana, Prasarana & Alat Kesehatan (**ASPAK**). Selain itu dikembangkan Sistem informasi pengamanan fasilitas alat kesehatan (**SIPATEN**) dan Sistem Informasi Pelaporan Pengujian Kalibrasi Alat Kesehatan (**SIPEKA**) yang berfungsi sebagai sarana memberikan pelayanan prima kepada pelanggan. Dan untuk meningkatkan kinerja pegawai telah dimiliki Sistem Informasi Absensi dan Pegawai (**SIAP**).

Peningkatan kerjasama dengan instansi lain dalam hal pelayanan pengujian kalibrasi alat kesehatan, diantaranya kerjasama dengan Rumah Sakit dan Distributor Alat Kesehatan dengan memberikan pelatihan kepada tenaga teknisnya untuk dapat melakukan pengujian kalibrasi alat kesehatan yang nantinya dapat melakukan pengujian kalibrasi yang secara langsung dibimbing dan diawasi oleh BPFK Jakarta. Kegiatan ini memberikan pendapatan dari pengujian kalibrasi alat kesehatan bagi BPFK Jakarta. Program pengembangan pelayanan tersebut di atas didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 110 Pegawai yang terdiri dari :

Tabel 2 Perbandingan Tenaga teknis dan Administrasi BPFK Jakarta

Jabatan	2021	2022
Administrasi	31	31
Struktural	2	2
Teknis	77	82
Jumlah	110	115

Rasio		
Administrasi	28%	27%
Teknis	72%	73%

Pengembangan kompetensi SDM BPFK Jakarta juga direncanakan untuk mendukung layanan yang telah diprioritaskan. Adapun rencana pengembangan SDM BPFK Jakarta tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Rencana Pengembangan jumlah SDM BPFK

No	Uraian	2021	2022
1	Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan	1	1
2	Kepala Sub bag Administrasi dan Umum	1	1
	Sub bag Administrasi dan Umum		
	Jenis tenaga Administrasi/ non Teknis	24	24
	Jenis tenaga Teknis	4	4
3	Kelompok substansi Tata Operasional		
	Jenis tenaga Administrasi/ non Teknis	2	2
	Jenis tenaga Teknis	7	7
4	Kelompok substansi Pelayanan teknis		
	Jenis tenaga Administrasi/ non Teknis	4	4
	Jenis tenaga Teknis	4	4
	Kelompok substansi Bimbingan Teknis		
	Jenis tenaga Administrasi/ non Teknis	1	1
	Jenis tenaga Teknis	2	2
5	Instalasi Proteksi Radiasi dan Uji Kesesuaian X-Ray		
	Jenis tenaga Administrasi/ non Teknis	0	0
	Jenis tenaga Teknis	15	16
5	Instalasi Kalibrasi Alat Ukur Standar, Radiasi dan Kalibrator Alat Kesehatan		
	Jenis tenaga Administrasi/ non Teknis	0	0
	Jenis tenaga Teknis	6	6
6	Instalasi Pengujian Kalibrasi Alat Kesehatan		
	Jenis tenaga Administrasi/ non Teknis	0	0
	Jenis tenaga Teknis	29	32
7	Instalasi Uji Produk		
	Jenis tenaga Administrasi/ non Teknis	0	0
	Jenis tenaga Teknis	4	5
8	Instalasi Pengujian Sarana Prasarana/Lembaga Inspeksi		
	Jenis tenaga Administrasi/ non Teknis	0	0
	Jenis tenaga Teknis	6	6
9	UPF PFK Palembang		
	Jenis tenaga Administrasi/ non Teknis	0	0
	Jenis tenaga Teknis	0	0
	Jumlah total Jenis tenaga Administrasi/ non Teknis	31	31
	Jumlah total Jenis tenaga Teknis	79	79
		110	115

d. Budaya Kerja Badan Layanan Umum

Presiden R.I. Joko Widodo pada tanggal 27 Juli 2021, dalam rangka momentum percepatan transformasi ASN telah menetapkan nilai-nilai dasar yang menjadi core values ASN di NKRI, yang disebut dengan BerAKHLAK yang merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

Panduan perilaku core values BerAKHLAK adalah sebagai berikut :

1. Berorientasi Pelayanan :

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
- Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan;
- Melakukan perbaikan tiada henti.

2. Akuntabel :

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif dan efisien;
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

3. Kompeten :

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
- Membantu orang lain belajar;
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

4. Harmonis :

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
- Suka menolong orang lain;
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

5. Loyal :

- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta Pemerintahan yang sah;
- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan Instansi dan Negara;
- Menjaga Rahasia Jabatan dan Negara.

6. Adaptif :

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreatifitas;
- Bertindak proaktif.

7. Kolaboratif :

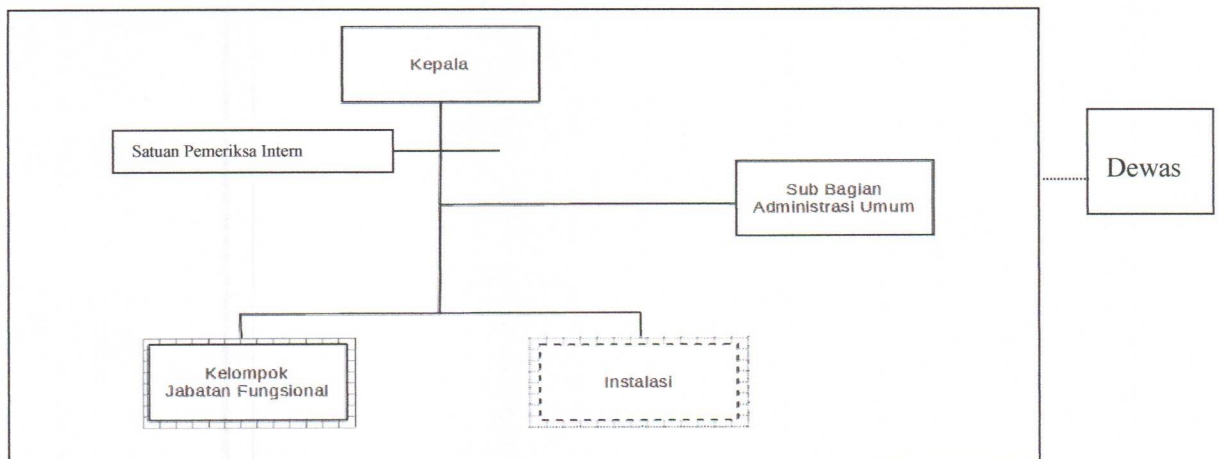
- Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;

- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Panduan perilaku BerAKHLAK dengan motto “bangga melayani bangsa” ini memberikan penguatan budaya kerja ASN yang profesional sekaligus memudahkan proses adaptasi bagi ASN ketika melakukan mobilitas antar instansi pemerintah, memperkuat peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, serta memudahkan birokrasi lebih lincah dan inovatif.

3. Susunan Pejabat Pengelola BLU Dan Dewan Pengawas

Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan, struktur organisasi BPFK Jakarta sebagai berikut:



1. Susunan Pejabat Pengelola BPFK Jakarta :

Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta :

- Subadri, ST.M.Si.

2. Pejabat Keuangan :

- dr. Bayu Aji Kelana

3. Pejabat Teknis :

- Dodi Giantara, ST
- Samburi, ST. MSi.
- Dessy Yulianti, ST
- Syahrul Muhammadiyah, ST, MT.

- Marlina Harahap, ST
 - Febriyanto Hermansyah, ST
4. Dewan Pengawas BPFK Jakarta Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 jo PP 74 Tahun 2012 bahwa instansi Badan Layanan Umum wajib mempunyai Dewan Pengawas. BPFK Jakarta belum membentuk Dewan Pengawas dikarenakan belum terpenuhinya syarat untuk membentuk Dewan Pengawas.
5. Uraian Tugas diantara Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum
- a. Kepala
- 1) Nama Jabatan : Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan
 - 2) Kewajiban :
 - a) Menyiapkan RSB;
 - b) Menyiapkan RBA;
 - c) Mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - d) Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLU.
 - 3) Tugas Pokok :
Memimpin pelaksanaan tugas Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4) Fungsi :
Perumusan pelaksanaan perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pemeriksaan rujukan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang pengujian dan kalibrasi alat kesehatan, pengendalian mutu dan ketatausahaan.
- b. Pejabat Keuangan
- 1) Nama Jabatan :
Koordinator Substansi Keuangan dan BMN
 - 2) Kewajiban :
 - a) Mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b) Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU;
 - c) Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - d) Menyelenggarakan pengelolaan kas; e) Melakukan pengelolaan utang piutang;
 - e) Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi BLU;
 - f) Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;

g) Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

3) Tugas Pokok :

Melaksanakan penyusunan program, pengolahan informasi, evaluasi dan laporan, urusan keuangan dan BMN.

4) Fungsi :

- a) Pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan laporan.
- b) Pelaksanaan pengolahan informasi.
- c) Pelaksanaan urusan keuangan.
- d) Pelaksanaan urusan Barang Milik Negara.

c. Pejabat Teknis

1) Nama Jabatan :

Koordinator Substansi Bimtek dan Mutu

2) Tugas Pokok :

Melaksanakan perencanaan, koordinasi, evaluasi pemantapan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang pengujian dan kalibrasi alat kesehatan.

3) Fungsi:

- a) Pelaksanaan pemantauan, analisis dan evaluasi pemantapan mutu eksternal;
- b) Pelaksanaan bimbingan teknis pengujian dan kalibrasi alat kesehatan di wilayah kerja; dan
- c) Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang pemantapan mutu.
- d) Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang pengujian dan kalibrasi alat kesehatan.

d. Pejabat Teknis

1) Nama Jabatan :

Koordinator Substansi Pelayanan

2) Tugas Pokok :

Melaksanakan perencanaan, koordinasi, evaluasi di bidang pelayanan

3) Fungsi:

- a) Penyusunan perencanaan, koordinasi dan evaluasi kegiatan pemantapan mutu internal dan eksternal di bidang pengujian dan kalibrasi alat kesehatan;
- b) Penyusunan perencanaan, koordinasi dan evaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang pengujian dan kalibrasi alat kesehatan;

6. Tugas dan Kewajiban Pejabat Pengelola

Tugas dan kewajiban pejabat pengelola BPFK Jakarta untuk penerapan PK-BLU meliputi Dewan Pengawas, Kepala BPFK Jakarta, Satuan Pengawasan Intern (SPI), Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagai berikut :

a. Kepala BPFK Jakarta

Menetapkan kebijakan operasional perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan dan pengendalian dalam pengujian dan kalibrasi alat kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan, pengamanan dan pengukuran paparan radiasi, pelayanan monitoring dosis radiasi personal, pengukuran luaran radiasi terapi, pengendalian mutu dan pengembangan teknologi pengamanan fasilitas kesehatan, serta jejaring kerja dan kemitraan dan bimbingan teknis di bidang pengamanan fasilitas kesehatan serta urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

b. Dewan Pengawas

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 jo PP 74 Tahun 2012 bahwa instansi Badan Layanan Umum wajib mempunyai Dewan Pengawas. BPFK Jakarta belum membentuk Dewan Pengawas.

Anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang sesuai dengan Nilai Omzet dan Nilai Aset. Komposisi keanggotaan Dewan Pengawas terdiri atas unsur-unsur pejabat dari Kementerian Negara/Lembaga dan Kementerian Keuangan, serta unsur tenaga ahli yang sesuai dengan kebutuhan BLU. Keanggotaan Dewan Pengawas Kementerian Negara/Lembaga dari unsur pejabat dan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dapat berupa keanggotaan *ex-officio* dari jabatan tertentu pada Kementerian Negara/Lembaga dan Kementerian Keuangan.

c. Satuan Pemeriksa Internal

1. Ikhtisar Jabatan

- a. Satuan Pemeriksa Intern BLU yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit kerja BLU yang menjalankan fungsi Pengawasan Intern. Untuk memastikan efektivitas Sistem Pengendalian Intern, SPI terdiri atas 1 (satu) orang auditor intern atau lebih dan dipimpin oleh kepala SPI.
- b. Jumlah auditor intern sebagaimana dimaksud di atas disesuaikan dengan besaran dan tingkat kompleksitas kegiatan BLU.

- c. Kebutuhan jumlah auditor intern dihasilkan dari analisis beban kerja yang dilakukan oleh SPI dan/atau unit di BLU yang membidangi sumber daya manusia.
 - d. Dalam hal SPI terdiri atas 1 (satu) orang auditor intern, auditor intern dimaksud juga bertindak sebagai kepala SPI.
 - e. Auditor intern SPI dapat terdiri atas PNS dan/ atau tenaga profesional non-PNS.
2. SPI dalam melaksanakan tugas memiliki kewenangan sebagai berikut:
- a. Mendapatkan akses terhadap seluruh dokumen, pencatatan, sumber daya
 - b. manusia, dan fisik aset BLU pada seluruh bagian dan unit kerja lainnya;
 - c. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pimpinan BLU dan/ atau dewan pengawas;
 - d. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan pimpinan BLU dan/ atau dewan pengawas;
 - e. Melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah dan/ atau aparat pemeriksaan ekstern pemerintah; dan
 - f. Mendampingi aparat pengawasan intern pemerintah dan/ atau aparat pemeriksaan ekstern pemerintah dalam melakukan pengawasan.

BAB II

KINERJA TAHUN BERJALAN (TA 2021) DAN RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) TAHUN 2023

1. Gambaran Kondisi BLU Tahun 2023

Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta dalam usaha merealisasikan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja telah mengupayakan melalui analisis kondisi lingkungan. Analisis dilakukan disamping untuk mendapatkan gambaran berapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan lingkungan dapat mempengaruhi pencapaian kinerja, analisis juga berguna untuk menentukan strategi yang tepat dalam pencapaian kinerja melalui pemetaan letak (positioning) yang jelas.

Analisis kondisi lingkungan dilakukan dengan mengacu pada variabel (deskriptor) pernyataan visi dan misi Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta. Kondisi lingkungan yang dimaksud mencakup lingkungan dalam (internal) dan lingkungan luar (eksternal), serta asumsi yang mendasari pencapaian target kinerja. Kondisi lingkungan dalam (internal) terdiri atas pelayanan, keuangan, organisasi dan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang dimiliki. Sedangkan kondisi lingkungan luar (eksternal) mencakup terbitnya peraturan perundangan, kebijakan pemerintah, perkembangan sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kondisi persaingan, dan globalisasi perekonomian. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BLU BPFK Jakarta antara lain:

a. Faktor Internal BLU

Analisis internal organisasi dilakukan dengan cara mengidentifikasi ke empat faktor yaitu Pelayanan, Keuangan, Organisasi dan SDM, serta Sarana dan Prasarana sehingga dapat ditemukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi.

1) Pelayanan

Kekuatan:

a) BPFK Jakarta telah terakreditasi untuk:

- SNI ISO/IEC 17025:2017 (Persyaratan Umum untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi) oleh Komite Akreditasi Nasional
- SNI ISO 17020:2012 (Persyaratan Umum untuk Kompetensi Lembaga Inspeksi) oleh Komite Akreditasi Nasional
- SNI ISO/IEC 17043:2010 (Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Uji Profisiensi) oleh Komite Akreditasi Nasional

b) BPFK Jakarta secara berkelanjutan menerapkan sistem manajemen yang efektif dan efisien dengan cara:

- Menjaga penerapan dan sertifikasi ISO 17025, ISO 17020 dan ISO 17043 secara berkala;
- Melakukan Audit Mutu internal dan eksternal secara berkala.
- Penambahan ruang lingkup terakreditasi dari setiap unit layanan seperti data berikut:

Tabel 4 Penambahan Ruang Lingkup Akreditasi 2022-2023

No.	Jenis layanan	Lembaga Akreditasi	2022	2023
1	Pengujian/Kalibrasi Alkes	KAN	3	-
2	Kalibrasi alat ukur standar & radiasi	KAN	2	-
3	Inspeksi Sarana Prasarana	KAN	1	-
4	Uji kesesuaian pesawat X-Ray	KAN & BAPETEN	-	1
	Pemantauan Dosis perseorangan	KAN	-	1
5	Uji Produk	KAN	-	2
6	Bimtek (Pelatihan dan Uji Kompetensi)	Dirjen Nakes dan BSNP	1	1
7	Uji Profisiensi	KAN	-	5

c) Memiliki Sistem Informasi manajemen untuk mendukung layanan BPFK Jakarta yang terintegrasi.

Pengembangan sarana prasarana yang direncanakan pada tahun 2023 meliputi pengembangan Sistem Informasi Pelayanan (**SimPEL**), Sistem informasi pengamanan fasilitas alat kesehatan (**SIPATEN**), dan Sistem sistem pelaporan pengujian kalibrasi alat kesehatan (**SIPEKA**) untuk percepatan pelayanan.

Kelemahan

a) Promosi pelayanan belum optimal

Jenis layanan BPFK Jakarta belum tersosialisasi secara baik kepada masyarakat yang sebenarnya membutuhkan jasa layanan BPFK Jakarta. Terutama industri alkes yang selama ini mengandalkan satu Laboratorium Uji di Indonesia. Sehingga untuk mengatasi masalah ini, BPFK Jakarta perlu meningkatkan promosi layanannya.

- b) Belum mampu melayani beberapa jenis pelayanan sesuai Permenkes 54 tahun 2015.

Perkembangan teknologi alat kesehatan yang sangat cepat belum dapat diimbangi oleh sumber daya BPFK Jakarta untuk melayani pengujian/kalibrasi alat kesehatan. Peralihan teknologi menjadi tantangan untuk dapat melayani semua kebutuhan industry alkes.

2. Keuangan

Penilaian Kinerja BLU di Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu indikator Kinerja Keuangan, Indikator Kinerja Operasional dan Indikator Mutu Pelayanan dan Manfaat Bagi Masyarakat. Proses penilaian kinerja BLU Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan PER-24/PB/2018 tentang Pedoman Penilaian Kinerja BLU bidang layanan kesehatan.

Didasarkan atas pertimbangan untuk memudahkan sasaran pengembangan institusi BPFK Jakarta ke depan maka dibutuhkan perubahan pengelolaan keuangan yang lebih mandiri dan fleksibel yang menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas : Adanya PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum diharapkan dapat menjadi acuan hukum untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Dengan demikian BPFK akan memperoleh kewenangan untuk mengelola dan menggunakan sumber daya keuangan yang bersumber dari hasil layanan BPFK.

Kekuatan

- a. Adanya subsidi pemerintah yang mendukung kegiatan layanan di BPFK Jakarta.
- b. Pendapatan Pelayanan BPFK Jakarta meningkat setiap tahun terutama peningkatan layanan pengujian dan kalibrasi alkes
- c. Menyediakan layanan keuangan untuk memperlancar pelayanan melalui SIPATEN.

BPFK Jakarta sudah melakukan pemilihan bank milik BUMN yang dapat memberikan kemudahan dalam bertransaksi financial bagi pengguna jasa layanan BPFK Jakarta. Kemudahan transaksi dalam layanan financial ini dilakukan dengan dengan teknologi digital perbankan dan Bridging Aplikasi SIPATEN sehingga

proses transaksi keuangan di BPFK Jakarta menjadi lebih praktis, aman serta modern.

Kelemahan

- a. Alokasi anggaran terbatas
- b. Audit internal keuangan belum optimal
- c. Belum optimalnya pelaksanaan efisiensi di beberapa instalasi/unit.

2) Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Peningkatan kompetensi pegawai dilakukan melalui jalur pendidikan dan pelatihan. Jalur pendidikan dapat diberikan melalui tugas belajar dan izin belajar. Jalur tugas belajar dapat menggunakan anggaran yang besumber pada Rupiah Murni/Pendapatan BLU. Jalur izin belajar dapat diberikan kepada pegawai dengan memberikan kemudahan proses perizinan, dan anggarannya menggunakan dana pribadi. Kompetensi pegawai ditingkatkan untuk menjamin kebutuhan mutu dan produktifitas layanan. Pelatihan yang direncanakan dan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan analisa kebutuhan pelatihan (AKP).

Kekuatan

- a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM BPFK Jakarta dijadikan visi dan misi untuk mendapatkan SDM Kompeten. Aset SDM kompeten yang saat ini dimiliki BPFK Jakarta secara terus menerus diperhatikan kebutuhannya.
- b. SDM BPFK Jakarta yang telah tersertifikasi oleh BNSP sebagai asesor kompetensi sebanyak 13 personil, 5 Personil telah tersertifikasi sebagai Pelatih/Instruktur oleh PPSDM Kesehatan dan 3 Personil tersertifikasi sebagai penyelenggara TOC oleh LAN. Ketiga sertifikasi tersebut menjadi kekuatan BPFK Jakarta untuk membuka layanan Pelatihan Pengujian dan Kalibrasi Alkes dan Uji Kompetensi TEM.
- c. Adanya peraturan peraturan legal terkait sertifikasi personil TEM yang wajib tersertifikasi baik untuk ASN maupun pegawai swasta dan bertumbuhnya pesatnya IPFK di Indonesia menjadi peluang bagi BPFK Jakarta untuk meningkatkan pendapatannya melalui pelatihan teknis dan uji kompetensi.

Kelemahan

- a. BPFK Jakarta belum mempunyai SDM di bidang Hukum. Layanan BPFK Jakarta adalah jenis layanan dibidang jasa, sehingga memungkinkan muncul adanya keluhan dan banding atas jasa layanan yang telah diberikan. SDM bidang hukum di

BPFK Jakarta belum dimiliki. Walaupun sampai dengan saat ini BPFK Jakarta belum pernah menerima keluhan dan banding atas jasa layanan yang telah diberikan.

- b. Pelatihan peningkatan kompetensi belum optimal

3) Sarana dan Prasarana

Kekuatan

- a. BPFK Jakarta berada pada lokasi strategis dan mudah diakses. Berlokasi di pusat Ibukota Jakarta sangat mudah diakses oleh pengguna jasa layanan BPFK Jakarta. Kepopuleran lokasi BPFK Jakarta juga dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat untuk menjadikan BPFK Jakarta sebagai pilihan utama. Lokasi yang strategis sering dilalui banyak orang akan membuatnya dikenal. Dekatnya dengan keramaian juga membuat BPFK Jakarta berpotensi diketahui pelanggan baru sehingga jangkauan akan lebih luas. Dengan beberapa kemungkinan tersebut akan banyak pelanggan yang terjaring sehingga memberikan efek baik terhadap BPFK Jakarta.
- b. Peralatan sesuai standar dan lengkap
- c. Peralatan standar yang tertelusur ke satuan internasional yang lebih tinggi

Kelemahan

- a. Gedung BPFK Jakarta saat ini masih dalam status izin pemanfaatan
Status kepemilikan Gedung BPFK Jakarta adalah milik Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian kesehatan RI. BPFK Jakarta diberikan hak penggunaan Gedung, segala bentuk pemeliharaannya diserahkan kepada BPFK Jakarta.
- b. Keterbatasan lahan sehingga tidak dapat menambah perluasan laboratorium
Luas lahan Gedung BPFK Jakarta yang terbatas menyebabkan kesulitan untuk memperluas fasilitas laboratorium dan parkir bagi pelanggan pengguna jasa BPFK Jakarta.

4) Indikator Kinerja Utama

Target indikator kinerja utama BPFK Jakarta tahun anggaran 2022 telah diturunkan menjadi target yang diberikan kepada setiap pegawai, sehingga diharapkan dapat mendukung kinerja BPFK Jakarta. Adapun indikator kinerja utama diberikan pada tabel berikut:

Tabel 5 Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Sasaran Indikator		Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan
1	Terwujudnya kepuasan pelanggan	KPI.1	Indeks kepuasan pelanggan	88	Nilai
2	Peningkatan kualitas dan cakupan jenis pelayanan SPA yang terakreditasi	KPI.2	Jumlah ruang lingkup pelayanan	155 Pelayanan	Jumlah
		KPI.3	Jumlah ruang lingkup Akreditasi	60 Lingkup Akreditasi	Jumlah
3	Peningkatan ketercapaian standar pelayanan minimum	KPI.4	Jumlah SOP yang dibuat dan diperbaiki	45 SOP	Jumlah
4	Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas	KPI.5	Persentase Tingkat keandalan alat ukur dan kalibrator	100%	Persentase
5	Peningkatan pembinaan teknis institusi pengujian pemerintah dan swasta	KPI.6	Persentase Institusi Pengujian fasilitas kesehatan yang memenuhi persyaratan	70%	Persentase
6	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM BPFK Jakarta	KPI.7	Persentase Pemenuhan Kompetensi SDM	75%	Persentase
7	Peningkatan pendapatan melalui produktifitas pelayanan	KPI.8	Jumlah sertifikat/Laporan Hasil Uji yang diterbitkan	40.000 sertifikat	Jumlah
		KPI.9	Pendapatan PNBP	8.5 Milyar	Jumlah
8	Perwujudan tata kelola keuangan yang akuntabel	KPI.10	Realisasi Anggaran	100%	Persentase

a. Faktor Eksternal BLU

Kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja BPFK Jakarta meliputi:

- a. Kebijakan dan produk hukum yang dikeluarkan pemerintah dalam bentuk undang – undang ataupun peraturan pemerintah :
 - ◆ Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - ◆ Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- ◆ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan;
- ◆ Peraturan Menteri Keuangan No.5/KMK.05/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum maka organisasi dan tata kerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta;
- ◆ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 tahun 2015 tentang Pengujian Kalibrasi Alat Kesehatan

b. Kondisi Politik, keamanan dan perekonomian

Kondisi politik dan keamanan didala negeri yang kondusif mempengaruhi perekonomian. Hal ini merupakan factor yang sangat penting untuk pencapaian rencana bisnis anggaran tahun 2023. Asumsi Mikro dan Makro yang mempengaruhi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6 Asumsi Mikro Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran

NO.	PARAMETER	ASUMSI 2023
1	Anggaran Remuneurasi Pegawai	Sebesar 27 % dari total anggaran
2	Anggaran Biaya Operasional	Sebesar 26,8 % dari total anggaran
3	Anggaran Biaya Investasi	Sebesar 40 % dari total anggaran
4	Tarif Pelayanan yang digunakan untuk setiap jenis pelayanan	Berdasarkan Unit Cost 100 %
5	Volume pelayanan	Meningkat sebesar 10%
6	Kebutuhan Pengembangan SDM	Terpenuhi sebesar 100 %
7	Peralatan Kesehatan	Berfungsi sebesar 60 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) BPFK Jakarta menetapkan anggaran remunerasi sebesar 40 % dari total anggaran.
- b) Subsidi dari Pemerintah berupa anggaran Biaya Operasional perkantoran dan operasional tupoksi diasumsikan sebesar 24 % dari total anggaran untuk menutup biaya operasional BPFK Jakarta agar pelayanan berjalan maksimal.
- c) Biaya Investasi diasumsikan sebesar 36 % dari total anggaran belanja dengan rincian 26 % bersumber dari anggaran Rupiah Murni dan 10 % dari anggaran BLU dengan harapan agar kebutuhan, peralatan medik dan non medik terpenuhi sehingga pendapatan meningkat.
- d) Volume pelayanan diasumsikan meningkat 100 % sehingga diharapkan dapat mendapatkan pendapatan dan prevalensi pelayanan pengujian kalibrasi dapat dikendalikan.
- e) Pemenuhan kebutuhan SDM diasumsikan 100 % terpenuhi diharapkan dapat mendukung pelayanan dan pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi.
- f) Peralatan medik diasumsikan berfungsi sebesar 80 % sehingga bisa mendukung pelayanan dan pelaksanaan program pengembangan serta optimalisasi.

Disamping itu analisis dan strategi juga didasarkan pada asumsi – asumsi ekonomi makro lainnya seperti yang dinyatakan dalam APBN 2023, yaitu:

Tabel 7 Asumsi Makro Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran

NO.	PARAMETER	ASUMSI 2023
1	Tingkat Inflasi	3,5 %
2	Tingkat Bunga Deposito	5,5 %
3	Nilai tukar rupiah / Kurs \$ 1	Rp15.198
4	Tingkat Bunga Pinjaman (SIBOR/LIBOR)	6,5 %

Sumber : www.bi.go.id Tahun 2022

Pendapatan yang terus meningkat di lima tahun ke depan juga diasumsikan bahwa tidak adanya inflasi yang cukup signifikan. Asumsi pendapatan tersebut diprediksi meningkat sejalan dengan adanya peningkatan ekonomi nasional yang dapat menggerakkan industri alat kesehatan dalam negeri (AKD).

- c. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi empat aspek yaitu kekuatan, kelemahan peluang dan ancaman yang berasal dari luar BPFK Jakarta. Peluang yang teridentifikasi merupakan kondisi untuk meningkatkan layanan yang ada saat ini, maupun kemungkinan layanan baru. Sedangkan ancaman memuat keadaan yang dirasakan saat ini maupun yang bersifat potensial terjadi dan sulit untuk dikendalikan oleh BPFK Jakarta.

- **Peluang**

- Besarnya kebutuhan pengujian/kalibrasi dan inspeksi SPA di seluruh wilayah Indonesia;
- Meningkatnya kebutuhan konsumen untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu dan aman;
- Bertambahnya jumlah Fasilitas kesehatan dan institusi lainnya yang mengajukan akreditasi;
- Adanya kewajiban pengujian, kalibrasi dan inspeksi Sarana Prasaran Alat Kesehatan;
- Luasnya jejaring kerja dengan stakeholder dalam bidang pengujian/kalibrasi alat kesehatan.
- Penerapan KMK No.5/KMK.05/2023 tentang penetapan BPFK Jakarta sebagai instansi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan, sangat membantu dan berpengaruh dalam pencapaian kinerja menyangkut fleksibilitas pengelolaan keuangan;
- Perubahan persyaratan dalam pengujian Nomor Ijin edar yang meminta hasil pengujian performa alat kesehatan dari Laboratorium Uji seperti BPFK Jakarta
- Penghargaan dari BAPETEN dan stackholder lainnya menambah kepercayaan masyarakat terhadap layanan BPFK Jakarta

Ancaman

- Subsidi pemerintah akan semakin berkurang;
- Harga-harga kebutuhan operasional meningkat akibat inflasi yang masih tinggi.
- Terbatasnya formasi SDM berkualifikasi teknis untuk penempatan di BPFK Jakarta;
- Alokasi anggaran untuk pengujian / kalibrasi di Fasilitas kesehatan dan institusi lainnya belum menjadi prioritas;

- Terbatasnya dokumen referensi / standar acuan pengujian, kalibrasi, dan inspeksi;
- Terbatasnya penyelenggara pelatihan kompetensi teknis khusus di dalam negeri
- Belum adanya regulasi yang mewajibkan transfer teknologi Sarana Prasaran Alat Kesehatan;
- Ketatnya persaingan dengan institusi pengujian sejenis pada lingkup nasional dan regional;
- Penerapan regulasi tentang pengujian dan kalibrasi Sarana Prasaran Alat Kesehatan belum optimal;
- Belum tersedianya ketertelusuran alat standar untuk beberapa alat menimbulkan tingginya biaya kalibrasi alat standar tersebut.
- Terbatasnya laboratorium kalibrasi alat ukur standar di Indonesia.

3. Rencana Kinerja Layanan BLU

Semakin disadari bahwa untuk dapat memenangkan persaingan, maka BPFK Jakarta harus dapat memberikan nilai dan kepuasan bagi pelanggan melalui layanan yang berkualitas dengan harga bersaing. Layanan yang berkualitas mempunyai pengaruh yang penting bagi pembentukan kepuasan konsumen. Semakin berkualitas suatu layanan yang diberikan, maka kepuasan pelanggan menjadi semakin tinggi. Pelanggan yang memiliki pengalaman yang baik dan merasa puas terhadap kualitas layanan, dapat memberikan keuntungan karena mereka akan terus menggunakan BPFK Jakarta dan bahkan mungkin merekomendasikan ke konsumen yang lain. Hal ini tentunya berakibat pada peningkatan pendapatan BPFK Jakarta. Sebaliknya tanpa kepuasan, pelanggan akan mudah untuk pindah ke institusi lain, dimana hal ini akan merugikan karena mengurangi pendapatan BPFK Jakarta.

Tabel 8 Pencapaian Target Kinerja Tahun Anggaran 2021

No	Nama Sasaran	Nama Indikator Kinerja		Satuan	2021		
					Target	Capaian 31 Oktober 2021	Prognosa 31 Desember 2021
1	Terwujudnya kepuasan pelanggan	KPI.1	Indeks kepuasan pelanggan	Nilai	88	79	79
2	Peningkatan kualitas dan cakupan jenis pelayanan SPA yang	KPI.2	Jumlah ruang lingkup pelayanan	Jumlah	155 Pelayanan	187	187

	terakreditasi	KPI.3	Jumlah ruang lingkup Akreditasi	Jumlah	60 Lingkup Akreditasi		79
3	Peningkatan ketercapaian standar pelayanan minimum	KPI.4	Jumlah SOP yang dibuat dan diperbaiki	Jumlah	45 SOP	54	54
4	Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas	KPI.5	Persentase Tingkat keandalan alat ukur dan kalibrator	Persentase	100%	77%	77%
5	Peningkatan pembinaan teknis institusi pengujian pemerintah dan swasta	KPI.6	Persentase Institusi Pengujian fasilitas kesehatan yang memenuhi persyaratan	Persentase	70%	75%	75%
6	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM BPFK Jakarta	KPI.7	Persentase Pemenuhan Kompetensi SDM	Persentase	75%	88%	88.00%
7	Peningkatan pendapatan melalui produktifitas pelayanan	KPI.8	Jumlah sertifikat/Laporan Hasil Uji yang diterbitkan	Jumlah	40.000 sertifikat	14511	47700
		KPI.9	Pendapatan PNBPN	Jumlah	8,5 Milyar	5,585,439,000	10,142,583,300
8	Perwujudan tata kelola keuangan yang akuntabel	KPI.10	Realisasi Anggaran	Persentase	100%	43,16%	92.99%

Nilai capaian Indikator Kinerja Utama sampai dengan Oktober 2021 terealisasi sebesar 63,16% dibandingkan dengan seluruh capaian Indikator Kinerja Utama. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan-kegiatan yang sudah ditargetkan untuk dilaksanakan pada tahun 2022 sudah dilaksanakan dengan baik, namun ada beberapa indikator yang belum tercapai sesuai target dan akan diupayakan tercapai sampai **dengan 31 Desember 2021**.

Isu-isu strategis bidang keuangan yang akan mempengaruhi capaian kinerja BPFK Jakarta antara lain:

- Kemampuan memperoleh, mengelola dan mengembangkan dana mandiri dengan cara mengurangi ketergantungan pada dana APBN. Pengurangan ketergantungan ini dapat dilakukan melalui pelayanan jasa pengujian, kalibrasi, inspeksi sarana prasarana alat kesehatan dan pelayanan jasa lainnya yang mendukung kegiatan BPFK;
- Efisiensi penggunaan dana melalui pengendalian internal yang baik, resource sharing, manajemen asset yang baik, dan penerapan secara baik anggaran berbasis kinerja;
- Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui penerapan sistem akuntansi komputerisasi, sistem pengendalian internal yang baik, audit dari pihak eksternal yang independen.

- Fleksibilitas dan kecepatan pengelolaan keuangan;
- Mengoptimalkan sistem pengendalian internal guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, kehandalan pelaporan keuangan, ketaatan pada peraturan yang berlaku;
- Mengoptimalkan kemandirian keuangan yang dilakukan melalui pengembangan unit bisnis yang ada di BPFK.

Analisis Pencapaian Target Kinerja

Perkembangan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah rumah sakit, klinik, dan puskesmas sesuai dengan 9 (Sembilan) provinsi wilayah binaan BPFK Jakarta. Layanan BPFK Jakarta diupayakan berjalan secara efektif dan efisien sehingga didapatkan Pendapatan yang optimal.

Tarif yang digunakan saat ini tarif PNBPN yang mengacu PP No. 64 tahun 2020. Tarif tersebut belum termasuk biaya operasional pelaksana, sebelumnya biaya operasional yang dibebankan kepada pelanggan mengacu pada standar biaya masukan (SBM) tahun berjalan. Dua komponen biaya tersebut akan sangat berpengaruh pada pembiayaan layanan pengujian dan kalibrasi dalam jumlah alkes yang cukup banyak di satu rumah sakit, hal ini cukup berat bagi rumah sakit. Sehingga perlu disusun pola tarif yang lebih rasional sehingga dapat diterima oleh pelanggan. Pola tarif tersebut harus dapat bersaing dengan institusi sejenis.

Perkembangan teknologi alat kesehatan menjadi penggerak untuk meningkatkan jenis dan jumlah layanan dengan penambahan ruang kingcup layanan pada:

- Pengujian dan kalibrasi alat kesehatan;
- Kalibrasi alat ukur standar alat kesehatan;
- Inspeksi sarana prasarana fasilitas kesehatan
- Uji profisiensi / Uji banding antar laboratorium sejenis;
- Inovasi layanan diluar tupoksi

Adapun rencana peningkatan jenis layanan selama tahun 2022 sampai dengan 2023 dapat dilihat seperti tabel dibawah ini :

Tabel 9 Tabel. Penambahan Jenis layanan BPFK Jakarta tahun 2022 - 2023

No	Jenis layanan	TAHUN	
		2022	2023
1	Pengujian kalibrasi alkes	Biometri	Non Contrac Tonometri
		Lensa meter	Slit Lamp
		Mikroskop	Snellen Chart
2	Kalibrasi alat ukur standar	Infusion device analyzer	Kalibrasi Defibrilator Analyzer
		Kalibrasi incubator analyzer	Kalibrasi Lux Meter
		Kalibrasi Thermohygrometer	
3	Inspeksi sarana prasarana	Gas Medik	Tata Udara
4	Uji Kesesuaian X-Ray	X-Ray Tomography	Pengukuran Raparan Rasiase Ruangan X-Ray Therapy
			Dental X-Ray
			Dental X-Ray Panoramik
			General Purpose X-Ray
	Pantauan Dosis Peroangan	Pengujian Thermo Luminisence Dosimeter (TLD) Lensa mata	
P engujian Thermo Luminisence Dosimeter (TLD) BARC			
5	Uji Produk Alkes	Bedside Monitor	Timbangan Bayi
		Incubator Bayi	Infant Warmer
			Bed Electric
			Phototherapy
6	Bimtek (Penelitian)	Produsen Alkes	

7	Uji profesiensi	Baby Incubator	Bedside Monitor
		Blood Pressure Monitor	Fetal Doppler
		Electrical Safety Analyzer	Autoclave
		Syringpump	Thermometer Dahi
		X-Ray General Purpose	

Selain melakukan pelayanan sesuai dengan TUPOKSI nya, BPFK Jakarta mengembangkan inovasi layanan baru. Adapun Inovasi layanan baru diluar tupoksi disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 10 Layanan Inovasi BPFK Jakarta diluar tupoksi

No.	Jenis layanan	Pengguna Layanan	Satuan	Tahun	
				2022	2023
1	Pelatihan Teknis	RS, PKM, IPFK, dll.	Orang	-	480
2	Lembaga Sertifikasi Produk	Produsen Alkes, Perguruan Tinggi.	Alkes	-	5
3	Tempat Uji Kompetensi Personil	RS, PKM, IPFK, dll	Orang	-	24
4	Manajemen Pemeliharaan Alkes	RS, PKM, dll.	Alat Kesehatan	-	10
5	Optimalisasi Aset	RS, PKM, dll.	Sarpras, SDM	-	5

Adapun jenis layanan inovasi yang akan dikembangkan sampai dengan tahun 2022 tertuang pada tabel dibawah ini

Tabel 11 Penambahan jenis layanan Inovasi BPFK Jakarta 2022-2023

No	Jenis Layanan	Tahun	
		2022	2023
1	Pelatihan Teknis	-	1. Pelatihan kalibrasi baby incubator 2. Pelatihan Kalibrasi Alkes Medium Risk 3. Uji Kompetensi TEM kalibrasi teknologi menengah 4. Pelatihan Manajemen Resiko Alat Kesehatan
2	Lembaga Sertifikasi Produk	-	Akreditasi SNI ISO/IEC 17036:2017
3	Tempat Uji Kompetensi Personil	-	Skema Kalibrasi Alkes teknologi Menengah
4	Manajemen Pemeliharaan Alkes	-	Alkes Medium Risk

Dari tabel diatas dapat kami uraikan kegiatan inovasi BPFK Jakarta sebagai berikut :

1) Pelatihan teknis pengujian dan kalibrasi alat kesehatan

Merupakan inovasi layanan yang akan dikembangkan oleh BPFK Jakarta pada tahun 2023. Untuk melanjutkan inovasi tersebut, tahun 2023 telah dimulai menyiapkan langkah langkah sebagai berikut :

- Sumber Daya Manusia yang kompeten dan sertifikasi baik sebagai Penyelenggara (TOC) oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) maupun sebagai narasumber yang tersertifikasi oleh BNSP maupun PPSDM Kesehatan;
- Menyusun Kurikulum dan modul pelatihan;
- Mendapatkan akreditasi sebagai penyelenggara pelatihan;

2) Menyiapkan sarana prasarana pelatihan baik inhouse maupun in situ (Hotel dll). Kegiatan tersebut secara kontinu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar, tersedianya penguji alat kesehatan yang kompeten.

3) Sebagai Lembaga sertifikasi Produk (*LS-Pro*)

Dengan adanya peraturan dan kebijakan penggunaan produk alat kesehatan dalam negeri, maka produsen alat kesehatan berlomba lomba untuk mendapatkan sertifikasi dan penggunaan Logo SNI wajib pada produknya, kondisi ini menjadi peluang BPFK Jakarta untuk menjadi Lembaga sertifikasi Produk alat kesehatan *Pre- Market*. Dalam Proses menjadi lembaga sertifikasi produk, maka BPFK Jakarta pada akhir tahun 2022 telah menyiapkan Sumber daya yang ada untuk :

- Peningkatan kompetensi SDM BPFK Jakarta;
- Menyusun dokumen mutu sesuai dengan SNI ISO: IEC 17036;
- Mengajukan Akreditasi SNI ISO: IEC 17036;
- Menyusun dan mengembangkan SKEMA sesuai dengan kebutuhan pelanggan;

4) Tahun 2023 disiapkan terlaksananya asesmen dari KAN untuk mendapatkan akreditasi untuk lingkup SNI ISO: IEC 17036 , BPFK Jakarta sebagai Lembaga Sertifikasi Produk.

5) Tempat Uji Kompetensi Personil

BPFK Jakarta telah ditunjuk Lembaga Sertifikasi Personil sebagai Tempat Uji Kompetensi Personil untuk memenuhi tuntutan layanan bermutu tinggi maka diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya dibuktikan dengan sertifikasi personil melalui uji kompetensi.

Bertumbuhnya Institusi pengujian alat kesehatan milik pemerintah maupun swasta pada tahun 2023 dan adanya gerakan Elektromedik Kompeten (Generik) yang digaungkan oleh Ikatan Elektromedik Indonesia (IKATEMI) menjadi peluang bagi BPFK Jakarta untuk mengembangkan layanan Uji Kompetensi Personil khususnya untuk Tenaga Teknik Elektromedik. Adapun hal yang telah disiapkan BPFK Jakarta sejak tahun 2023 antara lain;

- Telah melaksanakan Pelatihan Asesor Calon Asesi (ACA) yang dilaksanakan bersama BNSP
- Telah memiliki Asesor Kompetensi tersertifikasi BNSP
- Telah melaksanakan Pair Assessment sebagai Asesor Kompetensi Skema Pengujian dan Kalibrasi Alkes
- Menyiapkan sarana prasana sebagai tempat Uji Kompetensi
- Menyiapkan tarif pelaksanaan uji kompetensi yang kompetitif

6) Manajemen Pemeliharaan Alat Kesehatan

Selain layanan kalibrasi yang telah menjadi layanan unggulan BPFK Jakarta, rencana pengembangan berikutnya adalah Manajemen pemeliharaan alat

kesehatan, salahsatunya adalah perbaikan alat kesehatan. BPFK Jakarta akan menyiapkan SDM tersendiri untuk layanan perbaikan ini, yang secara penugasan dan unit kerja terpisah dari layanan kalibrasi alat kesehatan. Untuk mencapai hal tersebut beberapa langkah akan disiapkan oleh BPFK Jakarta antara lain;

- Pelatihan teknis pemeliharaan alkes
- Kerjasama dengan vendor dan principle alat kesehatan
- Pengadaan *tools* perbaikan alat Kesehatan

7) Optimalisasi Sumberdaya / Aset

Aset peralatan ukur yang akurat dan tertelusur memberikan peluang untuk layanan penyewaan alat ukur bagi mahasiswa dan peneliti. Layanan yang sudah dimulai dari tahun 2022 dan diharapkan terus berkembang. Selain itu adanya rencana renovasi gedung BPFK Jakarta untuk sarana pelatihan dan menyewakan ruang pertemuan/pelatihan tersebut. Adapun langkah-langkah yang disiapkan BPFK Jakarta antara lain;

- Renovasi aula Pelatihan
- Pengadaan alat kesehatan
- Pengadaan Kursi dan LED untuk pertemuan
- Menjalinkan kerjasama MoU dengan perguruan tinggi

4. Rencana Kinerja Keuangan

Proyeksi Pagu Pendapatan BPFK Jakarta dengan menerapkan BLU tahun 2022 - 2023 yang bersumber dari Rupiah Murni setiap tahunnya diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 10% setiap tahunnya. Sedangkan proyeksi Pagu Pendapatan yang bersumber dari PNBPN ada peningkatan sebesar maksimal 10% setiap tahunnya.

Peningkatan PNBPN tersebut bersumber dari penerimaan jasa dari penjualan TLD, pelatihan teknis, uji profisiensi dan Uji kompetensi personil dan layanan inovasi yang sebenarnya memiliki potensi yang besar, mengingat pangsa pasar, kemampuan SDM yang dimiliki BPFK Jakarta dan didukung sarana peralatan yang memadai. Proyeksi pendapatan BPFK Jakarta dengan menerapkan PK BLU sebagai berikut :

Tabel 12 Rincian Pendapatan per Unit Kerja

URAIAN	TAHUN	
	2022	2023
PENDAPATAN RM	24,631,545,000	20,670,429,000
PENDAPATAN PNBP	9,000,000,000	17,387,500,000
Jasa pengujian dan kalibrasi alat kesehatan	4.423.376.000	8.137.500.000
Jasa Uji Kesesuaian X-Ray dan PDP	2.754.547.000	4.019.160.000
Jasa Inspeksi Sarana dan Prasarana	1.116.252.000	2.033.440.000
Jasa kalibrasi alat ukur standar dan alat ukur radiasi	428.195.000	691.200.000
Jasa Uji Profisiensi	133.811.000	180.000.000
Jasa Bimbingan Teknis	36.771.000	38.400.000
Jasa Uji Produk	107.048.000	432.000.000
Pelatihan Teknis	-	201.600.000
LS PRO	-	574.200.000
Tempat Uji Kompetensi	-	480.000.000
Manajemen Pemeliharaan	-	360.000.000
Optimalisasi SDM & Aset	-	240.000.000
PENDAPATAN RM & PNBP	33.631.545.000	38,057,929,000
BELANJA RM	24.631.545.000	20.670.429.000
Belanja Pegawai	12.324.903.000	10.763.711.000
Belanja Barang	9.003.443.000	6.436.718.000
Belanja Modal	3.303.199.000	3.470.000.000
BELANJA PNBP/BLU	7.725.600.000	17,387,500,000
Belanja Barang	6.965.961.000	16,531,625,000
Belanja Modal	759.639.000	700,000,000
BELANJA APBN & PNBP	32.357.145.000	38,057,929,000

Saldo	-	155,875,000
-------	---	-------------

Penerimaan/pendapatan yang dikelola oleh BPFK Jakarta sebagai PK-BLU akan meningkat sesuai rencana strategis yang ditetapkan. Kenaikan pendapatan ini lebih banyak bersumber dari peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu pendapatan dari jasa layanan pengujian kalibrasi, inspeksi sarana prasarana alat kesehatan, Uji Produk alat kesehatan, penyelenggara uji profesiensi dan pendapatan dari layanan Inovasi lainnya, dengan rincian proyeksi pendapatan dari jenis layanan BPFK Jakarta sebagai Berikut:

1. Layanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan ini merupakan layanan yang diharapkan memberikan sumbangan terbesar pertama terhadap pemasukan BPFK Jakarta. Dari data pendapatan PNBP 2017 sampai dengan 2021 terlihat bahwa pendapatan yang dominan diperoleh dari pelayanan jasa laboratorium pengujian/kalibrasi alat kesehatan. Dengan jumlah fasilitas kesehatan yang ada dan semakin meningkat dari tahun ke tahun, maka peluang masih sangat terbuka terhadap layanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan, sehingga diharapkan laboratorium pengujian dan kalibrasi alat kesehatan mampu mencapai target proyeksi yang ditetapkan setelah BPFK menetapkan PK-BLU.
2. Layanan Uji kesesuaian X-Ray dan PDP merupakan layanan yang memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap pemasukan BPFK Jakarta dari tahun ke tahun. Dengan adanya persaingan dari laboratorium sejenis, BPFK Jakarta optimis masih menjadi pilihan utama fasyankes dalam pelayanan uji kesesuaian X-Ray. Layanan pembacaan dan penjualan TLD ini merupakan layanan yang memberikan sumbangan terbesar kedua setelah pengujian dan kalibrasi alat kesehatan. Namun kedepan diharapkan mampu menjadi pendapatan terbesar BPFK Jakarta dari tahun ke tahun. Untuk meningkatkan pendapatan dari jasa layanan ini, BPFK Jakarta akan melakukan inovasi dengan cara kerja sama operasional (KSO) dengan pihak ketiga, sehingga jenis TLD yang dipasarkan tidak menjadi monopoli 1 merk saja. Dengan adanya pilihan merk TLD yang bervariasi, maka diharapkan harga beli TLD lebih murah daripada saat ini, sehingga daya beli pengguna TLD semakin meningkat dan akan meninggalkan Film Badge dan beralih menggunakan TLD. Dengan semakin banyak pengguna TLD, maka frekuensi pembacaan TLD setiap bulan akan meningkat dan pendapatan BPFK juga akan meningkat. Akreditasi SNI/ISO/IEC : 17025 yang telah didapatkan maka diharapkan mutu pelayanan dan kepercayaan pengguna jasa uji kesesuaian semakin meningkat, sehingga laboratorium Uji kesesuaian mampu mencapai target proyeksi yang ditetapkan setelah BPFK menetapkan PK-BLU

3. Layanan inspeksi sarana dan prasarana ini merupakan layanan BPFK Jakarta, Lembaga inspeksi sarana dan prasarana BPFK Jakarta telah mendapatkan akreditasi ISO/IEC 17020:2012 sejak tahun 2016. Jasa layanan ini masih termasuk jenis layanan baru di rumah sakit, sehingga banyak rumah sakit belum memanfaatkan layanan inspeksi sarana dan prasarana. Manfaat layanan inspeksi sarana prasarana belum menjadi kebutuhan Rumah sakit untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan sarana prasarana. Dibutuhkan sosialisasi dan marketing yang berkesinambungan serta efektif untuk meraih pendapatan PNBK dari laboratorium sarana prasarana selain dibutuhkan dukungan regulasi untuk menjadikan inspeksi sarana prasarana sebagai persyaratan utama dalam mendapatkan akreditasi rumah sakit dari Komite Akreditasi (KARS) atau lembaga akreditasi internasional.
4. Layanan Kalibrasi Alat Ukur Standar, layanan ini untuk memenuhi kebutuhan Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan (IPFK) Swasta maupun Dinas Kesehatan dalam menjaga mutu alat ukur standar. Berkembangnya IPFK baru dan Unit Kalibrasi mandiri di rumah sakit menjadi pasar potensial bagi layanan kalibrasi alat ukur standar. Layanan ini telah mampu melayani 14 jenis alat ukur standard an 8 jenis alat ukur standar telah terakreditasi SNI/ISO IEC 17025:2017.
5. Penyelenggara uji profisiensi (PUP) alat kesehatan dan alat ukur standar mulai dikembangkan tahun 2017 seiring dengan peraturan Permenkes No. 54 Tahun 2015 dan persyaratan SNI/ISO IEC 17025:2017 sebagai jaminan mutu laboratorium. PUP BPFK Jakarta telah terakreditasi SNI/ISO IEC 17043:2010 dengan 6 ruang lingkup dan telah melayani PUP sebanyak 22 jenis ruang lingkup. Perkembangan kebutuhan laboratorium yang akan menambah ruang lingkup akreditasinya menjadi peluang yang sangat potensial untuk mendapatkan pendapatan BPFK Jakarta.
6. Tahun 2021 BPFK Jakarta ditunjuk oleh LSP Kesehatan sebagai tempat uji kompetensi (TUK) Teknik ELEktromedis (TEM) Skema Pengujian dan Kalibrasi Alat kesehatan. Dukungan SDM BPFK Jakarta yang telah tersertifikasi oleh BNSP sebagai assessor kompetensi sebanyak 13, 5 Personil telah tersertifikasi sebagai Pelatih/Instruktur oleh PPSDM Kesehatan dan 3 Personil tersertifikasi sebagai penyelenggara TOC oleh LAN, tiga hal tersebut menjadi kekuatan BPFK Jakarta untuk membuka layanan Pelatihan Pengujian dan Kalibrasi Alkes dan Uji Kompetensi TEM. Adanya peraturan peraturan legal terkait sertifikasi personil TEM yang wajib tersertifikasi baik untuk ASN maupun pegawai swasta dan bertumbuhnya pesatnya IPFK di Indonesia menjadi peluang bagi BPFK Jakarta untuk meningkatkan pendapatannya melalui pelatihan teknis dan uji kompetensi.
7. Layanan Uji Produk Alat Kesehatan telah melayani uji produk spyhmomanometer sejak tahun 2014 dan telah mendapatkan akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017. Tahun

2020 terjadi peningkatan layanan uji produk alat kesehatan lainnya seiring dengan pandemi covid-19. Pemerintah membuka kesempatan bagi innovator dalam negeri untuk memproduksi alat kesehatan buatan anak bangsa, sehingga ruang lingkup layanan meningkat menjadi 16 jenis alat kesehatan. Tahun 2021 dikembangkan cakupan uji produk pengujian keselamatan listrik yang mengacu standar SNI ISO/IEC 60601-1 : 2014 untuk mendapatkan akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017

Tabel 13 Rincian Pendapatan dan Belanja per unit Kerja

Kode	Uraian		TA 2021			TA 2023
			Target	Realisasi Per 31 Oktober 2021	Prognosis 31 Des 2021	Target
1	2		3	4	5	6
024.04.D G	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		25,868,683,000	13,365,765,168	26,499,208,525	26,964,218,000
6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes		8,500,000,000	6,267,351,000	10,153,764,120	17,387,500,000
	A	Pendapatan BLU	8,500,000,000	6,267,351,000	10,153,764,120	17,387,500,000
		1 Pendapatan Jasa Layanan BLU	8,500,000,000	6,267,351,000	10,153,764,120	17,387,500,000
		2 Pendapatan Hibah BLU	0	0	0	0
		3 Pendapatan Kerjasama BLU	0	0	0	0
		4 Pendapatan BLU Lainnya	0	0	0	0
4813	Program Dukungan Manajemen		17,368,683,000	7,098,414,168	16,345,444,405	9,576,718,000
	B	Pendapatan RM/PHLN/PHDN				
		1 Investasi	10,412,782,000	3,049,280,993	9,941,285,446	3,470,000,000
		2 Operasional	6,955,901,000	4,049,133,175	6,404,158,959	6,106,718,000
		Total	25,868,683,000	13,365,765,168	26,499,208,525	26,964,218,000

Total Target Pendapatan BLU pada tahun 2023 sebesar Rp17.387.500.000,- sedangkan target rencana belanja modal sebesar Rp3.470.000.000,- yang terdiri dari pembelian alat kalibrasi, sedangkan target rencana belanja operasional sebesar Rp6.106.718.000,- yang terdiri dari belanja BMHP, belanja Operasional Kegiatan, belanja gaji dan tunjangan, belanja keperluan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan kendaraan

operasional kantor, pembayaran terkait operasional kantor, pembayaran perjalanan dinas operasional pimpinan, pemeriksaan kesehatan pegawai, serta penambah daya tahan tubuh.

Total target pendapatan dan alokasi Belanja Agregat Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 14 Pendapatan Belanja Agregat

Kode	Uraian		TA 2021			TA 2023
	Unit/Kode Program/Kegiatan/Akun Pendapatan		Target	Realisasi Per 31 Oktober 2021	Prognosis 31 Des 2021	Target
1	2		3	4	5	6
I	PENDAPATAN		8,500,000,000	6,267,351,000	10,153,764,120	17,387,500,000
A	Pendapatan Jasa Layanan BLU		8,500,000,000	6,267,351,000	10,153,764,120	17,387,500,000
	1	Pendapatan Jasa Layanan BLU	8,500,000,000	6,267,351,000	10,153,764,120	17,387,500,000
	2	Pendapatan Hibah BLU	-	-	-	-
	3	Pendapatan Kerjasama BLU	-	-	-	-
	4	Pendapatan BLU Lainnya	-	-	-	-
		Pendapatan Jasa Perbankan	-	-	-	-
II	BELANJA OPERASIONAL		7,296,400,000	4,111,348,090	6,003,369,590	6,453,498,000
A	Belanja Barang BLU		7,296,400,000	4,111,348,090	6,003,369,590	6,453,498,000
	1	Belanja Gaji dan Tunjangan BLU	-	-	-	-
	2	Belanja Barang BLU	7,296,400,000	4,111,348,090	6,003,369,590	6,453,498,000
	3	Belanja Jasa BLU	-	-	-	-
	4	Belanja Pemeliharaan BLU	-	-	-	-
	5	Belanja Perjalanan BLU	-	-	-	-
	6	Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya	-	-	-	-
B.	Belanja RM/PHLN/PHDN/diluar belanja modal		21,473,850,000	14,982,627,068	19,438,517,315	17,200,429,000
	1	Belanja Pegawai	10,719,344,000	8,981,201,415	10,612,947,786	10,763,711,000
	2	Belanja Barang	10,754,506,000	6,001,425,653	8,825,569,529	6,436,718,000
	3	Belanja Jasa				

III	BELANJA MODAL		10,412,782,000	1,227,832,746	9,941,285,446	5,171,257,000
		1 Belanja Modal BLU				1,701,257,000
		2 Belanja Modal RM/PHLN/PHDN	10,412,782,000	1,227,832,746	9,941,285,446	3,470,000,000
IV	Surplus/(Defisit (I-II))		1,203,600,000	2,156,002,910	4,150,394,530	10,934,002,000
V	Penggunaan Saldo Kas BLU		-	-	-	
VI	RM/PHLN/PHDN/... (IV+V)		1,203,600,000	2,156,002,910	4,150,394,530	10,934,002,000
VII	Penerimaan RM/PHLN/PHDN/... (II.B+III.2)		31,886,632,000	16,210,459,814	29,379,802,761	20,670,429,000
VIII	Surplus/(Defisit (I-II) setelah Penerimaan dari RM/PHLN/PHDN/... (VI+VII))		40,386,632,000	22,477,810,814	39,533,566,881	38,057,929,000
IX	TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII)		40,386,632,000	22,477,810,814	39,533,566,881	38,057,929,000
X	TOTAL ANGAGRAN BELANJA (II+III)		17,709,182,000	5,339,180,836	15,944,655,036	11,624,755,000

Tabel 15 Estimasi Saldo Akhir TA (n-1) dan Saldo Awal TA (n)

URAIAN	REALISASI - PROYEKSI PENDAPATAN DAN BELANJA		
	2021	2022	Proyeksi 2023
Saldo Kas Awal Tahun			
JENIS PENDAPATAN			
Pendapatan Layanan Utama			
Pendapatan Layanan Penunjang			
Pendapatan Lainnya	10,153,764,120	15,108,359,000	17,387,500,000
JUMLAH PENDAPATAN PNBPN	10,153,764,120	15,108,359,000	17,387,500,000
PENDAPATAN RM	0	0	0
JUMLAH TOTAL PENDAPATAN	10,153,764,120	15,108,359,000	17,387,500,000
BELANJA			
BIAYA OPERASIONAL			
Belanja Pegawai (RM)	10,594,415,600	11,193,309,939	10,763,711,000
Belanja Barang (RM)	8,905,742,209	7,910,366,294	6,436,718,000
Belanja Modal (RM)	9,941,285,446	3,272,250,771	3,470,000,000
JUMLAH	29,441,443,255	22,375,927,004	20,670,429,000
Belanja Pegawai (PNBP)	-	-	-
Belanja Barang (PNBP)	6,084,648,423	5,984,523,391	10,920,960,000
Belanja Modal (PNBP)	-	1,103,917,345	6,466,540,000
JUMLAH	6,084,648,423	7,088,440,736	17,387,500,000

JUMLAH TOTAL BELANJA	35,526,091,678	29,464,367,740	38,057,929,000
SURPLUS/DEFISIT sebelum Pendapatan APBN-RM	(25,372,327,558)	(14,356,008,740)	(20,670,429,000)
SURPLUS/DEFISIT dengan Pendapatan APBN-RM	(25,372,327,558)	(14,356,008,740)	(20,670,429,000)

Tabel 16 Perhitungan Beban Layanan Per Unit Kerja

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
1	Pengujian dan Kalibrasi Alkes		
	Biaya Langsung :		
	Biaya Pegawai	13 pegawai	1,537,673,000
	Biaya Jasa Layanan	117 pegawai	369,918,699
	Biaya Bahan	1 tahun	1,786,915,667
	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	169,704,000
	Biaya Perjalanan Biasa	117 pegawai	421,985,111
	Jumlah Biaya Langsung		4,286,196,477
	Biaya Tidak Langsung :		
	Biaya Administrasi Perkantoran	1 tahun	446,573,111
	Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh	117 pegawai	61,106,667
	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	169,704,000
	Biaya Langganan dan Jasa	1 tahun	69,111,111
	Biaya Barang Operasional lainnya	1 tahun	90,834,222
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		837,329,111
	Total biaya		5,123,525,588
2	Kalibrasi Alat Ukur Standar dan Alat Ukur Radiasi		
	Biaya Langsung :		
	Biaya Pegawai	5 pegawai	591,412,692
	Biaya Jasa Layanan	117 pegawai	142,276,423
	Biaya Bahan	1 tahun	687,275,256
	Biaya Pemeliharaan	1 tahun	65,270,769
	Biaya Perjalanan Biasa	117 pegawai	162,301,966

			Jumlah Biaya Langsung			1,648,537,107
		Biaya Tidak Langsung :				
			Biaya Administrasi Perkantoran	1	tahun	171,758,889
			Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh	11 7	pegawai	23,502,564
			Biaya Pemeliharaan	1	tahun	65,270,769
			Biaya Langganan dan Jasa	1	tahun	26,581,197
			Biaya Barang Operasional lainnya	1	tahun	34,936,239
			Jumlah Biaya Tidak Langsung			322,049,658
		Total biaya				1,970,586,765
3	Inspeksi Sarana dan Prasarana					
		Biaya Langsung :				
			Biaya Pegawai	6	pegawai	709,695,231
			Biaya Jasa Layanan	11 7	pegawai	170,731,707
			Biaya Bahan	1	tahun	824,730,308
			Biaya Pemeliharaan	1	tahun	78,324,923
			Biaya Perjalanan Biasa	11 7	pegawai	194,762,359
			Jumlah Biaya Langsung			1,978,244,528
		Biaya Tidak Langsung :				
			Biaya Administrasi Perkantoran	1	tahun	206,110,667
			Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh	11 7	pegawai	28,203,077
			Biaya Pemeliharaan	1	tahun	78,324,923
			Biaya Langganan dan Jasa	1	tahun	31,897,436
			Biaya Barang Operasional lainnya	1	tahun	41,923,487
			Jumlah Biaya Tidak Langsung			386,459,590
		Total biaya				2,364,704,118
4	Uji kesesuaian pesawat X					
		Biaya Langsung :				
			Biaya Pegawai	10	pegawai	1,182,825,385
			Biaya Jasa Layanan	11 7	pegawai	284,552,846
			Biaya Bahan	1	tahun	1,374,550,513

			Biaya Pemeliharaan	1	tahun	130,541,538
			Biaya Perjalanan Biasa	11 7	pegawai	324,603,932
			Jumlah Biaya Langsung			3,297,074,213
		Biaya Tidak Langsung :				
			Biaya Administrasi Perkantoran	1	tahun	343,517,778
			Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh	11 7	pegawai	47,005,128
			Biaya Pemeliharaan	1	tahun	130,541,538
			Biaya Langganan dan Jasa	1	tahun	53,162,393
			Biaya Barang Operasional lainnya	1	tahun	69,872,479
			Jumlah Biaya Tidak Langsung			644,099,316
		Total biaya				3,941,173,529
5	Pemantauan Dosis perseorangan					
		Biaya Langsung :				
			Biaya Pegawai	9	pegawai	1,064,542,846
			Biaya Jasa Layanan	11 7	pegawai	256,097,561
			Biaya Bahan	1	tahun	1,237,095,462
			Biaya Pemeliharaan	1	tahun	117,487,385
			Biaya Perjalanan Biasa	11 7	pegawai	292,143,538
			Jumlah Biaya Langsung			2,967,366,792
		Biaya Tidak Langsung :				
			Biaya Administrasi Perkantoran	1	tahun	309,166,000
			Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh	11 7	pegawai	42,304,615
			Biaya Pemeliharaan	1	tahun	117,487,385
			Biaya Langganan dan Jasa	1	tahun	47,846,154
			Biaya Barang Operasional lainnya	1	tahun	62,885,231
			Jumlah Biaya Tidak Langsung			579,689,385
		Total biaya				3,547,056,176
6	Uji Produk					
		Biaya Langsung :				
			Biaya Pegawai	4	pegawai	473,130,154

			Biaya Jasa Layanan	11 7	pegawai	113,821,138
			Biaya Bahan	1	tahun	549,820,205
			Biaya Pemeliharaan	1	tahun	52,216,615
			Biaya Perjalanan Biasa	11 7	pegawai	129,841,573
			Jumlah Biaya Langsung			1,318,829,685
		Biaya Tidak Langsung :				
			Biaya Administrasi Perkantoran	1	tahun	137,407,111
			Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh	11 7	pegawai	18,802,051
			Biaya Pemeliharaan	1	tahun	52,216,615
			Biaya Langganan dan Jasa	1	tahun	21,264,957
			Biaya Barang Operasional lainnya	1	tahun	27,948,991
			Jumlah Biaya Tidak Langsung			257,639,726
			Total biaya			1,576,469,412
7	Bimbingan teknis					
		Biaya Langsung :				
			Biaya Pegawai	3	pegawai	354,847,615
			Biaya Jasa Layanan	11 7	pegawai	85,365,854
			Biaya Bahan	1	tahun	412,365,154
			Biaya Pemeliharaan	1	tahun	39,162,462
			Biaya Perjalanan Biasa	11 7	pegawai	97,381,179
			Jumlah Biaya Langsung			989,122,264
		Biaya Tidak Langsung :				
			Biaya Administrasi Perkantoran	1	tahun	103,055,333
			Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh	11 7	pegawai	14,101,538
			Biaya Pemeliharaan	1	tahun	39,162,462
			Biaya Langganan dan Jasa	1	tahun	15,948,718
			Biaya Barang Operasional lainnya	1	tahun	20,961,744
			Jumlah Biaya Tidak Langsung			193,229,795
			Total biaya			1,182,352,059

Perkiraan maju Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta 2 Tahun kedepan untuk belanja volume masing-masing output beserta perkiraan maju 2 tahun kedepan untuk target pendapatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 17 Prakiraan Maju Pendapatan dan belanja

Tahun	Pagu Belanja BLU	Pagu Pendapatan BLU
TA 2021	6,867,200,000	8,000,000,000
TA 2022	7,296,400,000	8,500,000,000
TA 2023	17,387,500,000	17,387,500,000
TA 2024	28.142.927.000	28.142.927.000

Tabel 18 Rencana Kebutuhan RM

Total Belanja RM	2021	2022	2023
		28,420,739,000	23,601,332,000
Belanja Pegawai	10,719,344,000	12,324,903,000	10,763,711,000
Belanja Barang	9,775,801,000	7,979,115,000	6,436,718,000
Belanja Modal	7,925,594,000	3,297,314,000	3,470,000,000

Rencana Bisnis dan Anggaran menganut pola anggaran Fleksibel (*Flexible budget*) yaitu Belanja Badan Layanan Umum dapat melampaui atau dibawah pagu anggaran sesuai dengan realisasi penerimaan Belanja BLU yang melampaui pagu anggaran dapat dilakukan dalam satu angka prosentase terhadap pagu anggaran (ambang batas).

Dalam menghitung ambang batas belanja maka Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain naik/turun realisasi anggaran tahun sebelumnya, realisasi/prognosa tahun berjalan dan target anggaran pada tahun anggaran yang akan datang.

Berdasarkan rencana anggaran beserta realisasi anggaran tahun anggaran yang lalu, dimana pagu belanja selalu berada dibawah angka realisasi penerimaan dan angka target maka Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta mengajukan ambang batas belanja menyesuaikan dengan kebutuhan antara 5% - 20%.

Berdasarkan laporan keuangan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 19 Ambang Batas Belanja

No	Uraian	2021	2022	Prognosa 2023
1	Target Pendapatan	8,500,000,000	9,000,000,000	17,387,500,000
2	Pagu Belanja	7,296,400,000	7,725,600,000	17,387,500,000
3	Realisasi Penerimaan	10,153,764,120	15,108,359,000	20,000,000,000
4	Prosentase Realisasi	119.46%	167.87%	115.03%
5	Realisasi Belanja	6,003,369,590	7.088.440.736	16,400,000,000
6	Prosentase Belanja	82.28%	91.75%	94.32%
7	Ambang Batas		10%	10%

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kinerja pelayanan BPFK Jakarta tahun 2022 mencapai 137,98%, sedangkan realisasi pendapatan tahun 2022 mencapai sebesar 167,87%.
2. Realisasi belanja/penyerapan anggaran tahun 2022 mencapai 91,06 %.
3. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BPFK Jakarta tahun 2023 akan melaksanakan program strategis dari jasa layanan pengujian, kalibrasi, inspeksi sarana prasarana alat kesehatan, pelatihan teknis, penyelenggara uji profisiensi antar laboratorium dan pendapatan dari usaha lainnya, meliputi jasa Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan, Uji Kesesuaian X-Ray, Inspeksi Sarana Prasarana, Kalibrasi Alat Ukur Standar, Pelatihan Teknis , Uji Profisiensi, Uji Produk Alat Kesehatan, dan Pemantauan Dosis Perseorangan yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta.
4. RBA BPFK Jakarta untuk tahun 2023, diproyeksikan penilaian kinerja BLU dengan total score sebesar 85,28 dan tingkat kinerja AA.
5. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BPFK Jakarta disusun berdasarkan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp38.057.929.000,- berasal dari: Belanja Pegawai : Rp10.763.711.000,- Belanja Barang : Rp17.357.678.000,- Belanja Modal : Rp9.936.540.000,-
6. Secara spesifik kegiatan yang disiapkan untuk tahun 2023 adalah :
 - a. Meningkatkan promosi layanan BPFK Jakarta
 - b. Merancang pola tarif baru yang kompetitif
 - c. Efisiensi dan efektifitas kegiatan layanan
 - d. Melakukan Inovasi terhadap layanan BPFK Jakarta
 - e. Optimalisasi pengelolaan piutang
 - f. Menerapkan sistem manajemen yang lebih efektif dan efisien dengan menerapkan Sertifikasi SNI ISO/IEC 17025, SNI ISO/IEC 17020, SNI ISO/IEC 17043, dan Standar Sertifikasi lainnya yang mendukung Visi dan Misi BPFK Jakarta; Meningkatkan jenis dan volume layanan dengan menambah ruang lingkup layanan pengujian, kalibrasi, dan inspeksi SPA;
 - g. Menjadi Pusat Pelatihan dan Sertifikasi SDM di bidang pengamanan fasilitas kesehatan;

- h. Menjadi Penyelenggara Uji profisiensi / Uji banding antar laboratorium untuk lingkup kalibrasi, pengujian, dan inspeksi;
 - i. Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan (SimPEL BPFKJ) untuk percepatan pelayanan;
 - j. Meningkatkan jumlah layanan melalui jejaring kerja dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
 - k. Inovasi percepatan pelayanan seperti one day service;
 - l. Perluasan layanan kalibrasi alat ukur standar pada lingkup industri alat kesehatan dan non alat kesehatan;
 - m. Pelayanan uji prototipe alat kesehatan dari industri, lembaga riset, dan universitas;
 - n. Tata kelola bidang keuangan yang sistematis dan akuntabel
 - d. Anggaran Investasi peralatan tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp9.703.955.000,- bersumber dari BLU dan Rp6.233.955.000,- digunakan untuk keperluan pembelian alat kalibrasi yang menunjang peningkatan pendapatan BPFK Jakarta. Anggaran investasi untuk renovasi Gedung operasional layanan diproyeksikan sebesar Rp3.470.000.000.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni.
 - e. Pengembangan sarana prasarana yang direncanakan pada tahun 2023 meliputi pengembangan Sistem Informasi Pelayanan (**SimPEL**), Sistem informasi pengamanan fasilitas alat kesehatan (**SIPATEN**), dan Sistem sistem pelaporan pengujian kalibrasi alat kesehatan (**SIPEKA**) untuk percepatan pelayanan
 - f. Peningkatan kerjasama dengan instansi lain dalam hal Meningkatkan jumlah layanan melalui jejaring kerja dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (MoU), karena setiap tahun mengalami peningkatan jumlah layanan dan pendapatan.
7. Hambatan dalam melaksanakan kegiatan :
- a. Persaingan yang ketat antar institusi pengujian kalibrasi alat, baik pemerintah maupun swasta karena semakin bertambah dan berkembangnya institusi pesaing swasta lebih agresif dan fleksibel dalam sistem marketing.
 - b. Formasi SDM teknis terbatas sehingga kurang optimal dalam pelaksanaan tugas ke fasyankes.
 - c. Terbatasnya alokasi anggaran yang diberikan ke BPFK Jakarta untuk belanja modal terutama pengadaan alat kalibrasi, karena sebagai penunjang pelayanan ke faskes binaan tidak optimal.
8. Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut manajemen BPFK Jakarta menetapkan upaya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan jumlah layanan melalui jejaring kerja dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (MoU), karena setiap tahun mengalami peningkatan jumlah layanan dan pendapatan.
- b. Mengadakan Formasi kebutuhan SDM teknis melalui bagian kepegawaian.
- c. Melakukan revisi anggaran atau peregesteran anggaran dari belanja barang ke belanja modal dan berkoordinasi dengan eselon I terkait alokasi dana PEN untuk alokasi belanja modal.

B. Hal-Hal Lain Yang Perlu Mendapat Perhatian

1. Saving pendanaan untuk Kegiatan/Aktivitas Pengembangan Pada Rencana Strategi Bisnis BPFK Jakarta, terdapat Program Peningkatan pendapatan melalui produktifitas pelayanan baik Layanan Umum maupun Layanan Unggulan. Di tahun 2023 direncanakan pengembangan aplikasi layanan yang terintegrasi untuk memudahkan pelanggan dalam mendapatkan layanan secara tepat dan cepat. Kemudian untuk belanja operasional dan belanja bahan meningkat dikarenakan adanya penambahan layanan baru. Mengingat keterbatasan anggaran Pemerintah berupa dukungan bantuan Rupiah Murni semakin terbatas sehingga untuk dapat memastikan bahwa pengembangan dan belanja operasional tersebut berjalan maka BPFK Jakarta harus melakukan saving pendanaan untuk kegiatan/aktivitas tersebut.
2. Rencana Kerjasama
 - a. Perluasan kerjasama dalam hal pengujian dan kallibrasi alat Kesehatan yang dilakukan sebagai upaya optimalisasi aset BPFK Jakarta.
 - b. Kerjasama Manajemen dengan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta dalam penyelenggaraan pelatihan-pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM.
 - c. Kerjasama dengan pihak Perbankan dalam program peningkatan pelayanan.
3. Perubahan Tarif disesuaikan dengan kenaikan harga bahan habis pakai dan beban operasional.
4. Perubahan Remunerasi menyesuaikan dengan peningkatan target pendapatan. Rencana penambahan pegawai baik dari ASN ataupun dari P3K menyesuaikan dengan beban kerja di masing-masing instalasi
5. Rencana Kerjasama dengan pihak ketiga Untuk meningkatkan pendapatan operasional BPFK Jakarta melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta.